



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



## SAMBUTAN MENTERI PANRB

MARET 2019  
APRIL 2019

DISUSUN OLEH :  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PANRB

 @KEMENPANRB

 @KEMPANRB

 @KEMPANRB

 [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)





## KATA PENGANTAR

Naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB bukan sekedar lembaran-lembaran naskah yang bersifat administratif. Naskah-naskah tersebut merupakan wujud “kebijakan yang berbicara”, yang disampaikan secara langsung oleh Menteri PANRB selaku pimpinan organisasi.

Tidak hanya sebagai media penyampaian kebijakan, materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB juga digunakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam hal informasi capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, kehadiran Menteri PANRB dan materi yang disampaikannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian banyak pihak.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Sekretariat Kementerian PANRB menyusun buku yang berjudul “**SAMBUTAN MENTERI PANRB MARET-APRIL 2019**”, yang merupakan kompilasi naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB periode bulan MARET hingga APRIL ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para peserta yang menghadiri acara pada saat Menteri PANRB menyampaikan materinya.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak.

Jakarta, Mei 2019

**Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.**

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





## DAFTAR ISI

### Kata Pengantar

### Daftar Isi

### Sambutan Menteri PANRB

#### MARET 2019

1. Sambutan Acara Penerimaan CPNS Kemenpanrb T.A. 2018, Jakarta, 4 Maret 2019 ..... 1
2. Sambutan Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 6 Maret 2019 ..... 4
3. *Pointers* Sambutan pada Acara “Kementerian PANRB Mendengar”, 8 Maret 2019 ..... 9
4. *Pointers* Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional, Jakarta, 8 Maret 2019..... 11
5. Sambutan (Laporan) pada Acara *2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop*, Bali, 14 Maret 2019..... 16
6. *Keynote Speech* pada Kongres Teknologi Nasional 2019 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, 20 Maret 2019..... 21
7. Kuliah Umum IPDN tentang Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Melayani, Jatinangor, 26 Maret 2019 26
8. Sambutan Penandatanganan Komitmen dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Jakarta, 27 Maret 2019 ..... 32
9. Laporan Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE, Jakarta, 28 Maret 2019 ..... 35

#### APRIL 2019

10. Pelantikan Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, 1 April 2019 ..... 39
11. Sambutan pada Acara *Training of Trainer* Pengembangan Kapasitas Akademisi Terhadap SAKIP, Jakarta, 4 April 2019 ..... 42
12. Sambutan *Multi-Stakeholder Human Resources and Organization Development Consortium*, Jakarta, 4 April 2019 ..... 45
13. Sambutan pada Acara Pembukaan Muktamar Pemuda Islam (*Islamic Youth Congress*), Jakarta, 4 April 2019 ..... 51
14. Sambutan pada Acara *Workshop* Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Satker di Lingkungan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 11 April 2019 ..... 56
15. Sambutan pada Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi dan *ICoASHE*, Surabaya, 22 April 2019 ..... 60
16. Sambutan pada Rakornas Kearsipan, Hari Kearsipan Nasional, dan *ANRI Awards*, Jakarta, 25 April 2019..... 65
17. Kuliah Umum Akpol “Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Institusi dan Generasi Polri yang Tangguh Menghadapi Dinamika Keamanan”, Semarang, 30 April 2019 ..... 70



# **MARET**

## **2019**





**SAMBUTAN ACARA  
PENERIMAAN CPNS KEMENPANRB T.A. 2018  
JAKARTA, 4 MARET 2019**

**Yang saya hormati:**

- Ketua KASN dan Para Komisioner KASN;
- Sekretaris dan Para Deputi Kementerian PANRB;
- Hadirin dan Para CPNS yang Saya Banggakan.

**Assalaamua'alaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita senantiasa penuh semangat dalam membangun bangsa dan negara. Pada hari ini, keberlanjutan upaya itu dilakukan melalui pelantikan CPNS T.A. 2017 menjadi PNS, serta pembukaan orwastu bagi CPNS T.A. 2018.

*The founding fathers*, Ir. Soekarno, pernah berkata “*beri aku sepuluh pemuda, maka akan ku guncangkan dunia*”. Sekarang, dihadapan saya, ratusan pemuda-pemudi memantapkan komitmen perjuangannya sebagai aparatur negara, maka ini merupakan momentum penting lahirnya generasi baru ASN, khususnya pada Kementerian PANRB -- sebagai “*aset dan jaminan terbaik bangsa*” dalam menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang.

*Mengapa demikian?* Karena, anda berhasil melampaui ketatnya kompetisi rekrutmen ASN terbesar di dunia, yang melibatkan 3,5 juta pelamar, dengan sistem yang sangat transparan dan akuntabel. Saya ucapkan selamat, bahwa tahapan ini adalah puncak pertama dari seluruh doa, usaha, perjuangan anda, orang tua, keluarga dan kita semua.

Namun, ini juga merupakan pintu gerbang yang mengawali pengabdian anda di masa mendatang, maka cepatlah beradaptasi dan ubahlah *mindset* berpikir. Peran negara hadir untuk melayani masyarakat, maka tugas anda sebagai aparat negara adalah melayani masyarakat.

Tugas ini tidaklah mudah, melainkan terus berkembang menjadi lebih kompleks. Negara, pemerintah, dan seluruh sub-ordinat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah dihadapkan oleh dinamika perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Faktanya, sekarang hadir era revolusi industri 4.0 yang mengubah semua *landscape* kehidupan, sebentar lagi kita memasuki *supersmart society 5.0.*, maka mau tidak mau, pola pemerintahan termasuk pola kerja aparatur juga semakin bertransformasi ke arah itu.





## MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Oleh karenanya, penting bagi anda semua, untuk selalu mengembangkan diri, terus belajar, terus bekerja keras, terus berinovasi, terus meningkatkan kapasitas dan daya saing yang positif, terus meluaskan jaringan. Jangan pernah berhenti untuk beradaptasi, jangan pula terbesit untuk meninggalkan “akar” kearifan lokal, budaya dan nasionalisme kita.

Banggalah dengan jati diri bangsa Indonesia yang besar, tangguh, yang optimis mewujudkan visi Indonesia yang maju dan madani di tahun 2045. Berpikirlah selalu tentang kepentingan rakyat diatas segalanya, karena itulah “lentera” yang menerangi jiwa kepemimpinan anda sebagai ASN untuk selalu peduli kepada masyarakat, serta mencurahkan kinerja untuk kemaslahatan bangsa.

Jangan terlarut dalam “zona aman dan nyaman”, kritislah memandang strategi kedepan, sehingga anda berevolusi menjadi ASN-ASN tauladan, tumpuan bagi pilar - pilar reformasi birokrasi, sandaran bagi berlabuhnya harapan masyarakat, serta “mesin utama” yang mendorong tumbuhnya peradaban baru di tengah masyarakat, melalui simbol ketertiban sosial, tegaknya supremasi hukum serta kokohnya pranata kelembagaan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.



### **Anak-anakku yang saya banggakan,**

Dalam sebuah organisasi, yang terpenting adalah bekerja secara *team work*, ditambah pula adat ketimuran Indonesia, maka etika dan sopan santun juga penting. Jalinlah hubungan, komunikasi dan pendekatan kerja yang saling menguatkan. Para senior juga perlu terbuka memberikan orientasi kepada juniornya, menularkan pengalaman kerja, bangun rasa percaya diri sebagai sebuah tim yang solid. Janganlah



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

individualis, kembangkan sinergi antar individu, antar unit kerja dan lintas sektoral. Jadilah tajam tanpa melukai, jadilah cepat tanpa mendahului, jadilah pintar tanpa menggurui.

Abraham Lincoln pernah berkata, “hampir semua orang mampu menghadapi kesulitan, tapi jika ingin mengetahui karakternya, berilah dia kekuasaan”. Salurkan rasa syukur dan bangga menjadi PNS, melalui sikap yang amanah, jujur, berintegritas, bermoral agama untuk menjangkar setiap pelaksanaan tugas dan keberhasilan anda.



Suatu saatnya nanti, saya sebagai generasi yang tua, hanya akan bisa melihat dan menitipkan nasib bangsa, dan berjalannya pemerintahan ini di pundak anda semua sebagai generasi penerus. Apa yang dilakukan di masa sekarang akan menjadi sejarah bagi anak dan cucu di masa mendatang. Maka, berbuatlah yang terbaik, berkaryalah yang terhebat dan berusaha dengan sekuatnya untuk membangun bangsa.

Selamat bergabung dengan keluarga besar ASN Kementerian PANRB. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita, dalam pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.

**Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN  
PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PEKANBARU  
PEKANBARU, 6 MARET 2019**



**Yang saya hormati:**

- Gubernur, Kapolda serta Unsur Forkopimda Prov. Riau;
- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB;
- Wali Kota, Wakil Wali Kota, Unsur Forkopimda dan Para Pejabat Struktural Kota Pekanbaru; serta
- Para Hadirin yang Berbahagia.

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

***Salam Sejahtera untuk Kita Semua***

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang merupakan MPP ke-tiga di Sumatera (atau yang ke-14 secara keseluruhan di Indonesia).

**Para hadirin yang saya hormati,**

Menentukan prioritas dan menjaga akuntabilitas kinerja adalah solusi bagi permasalahan strategis nasional. Pembangunan infrastruktur, menguatkan pilar aturan hukum serta pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas, juga merupakan standar penting bagi peningkatan kehidupan dan peradaban.



*“Lebih dari itu, dalam suatu pemerintahan, kebijakan publik haruslah adaptif, fokus program pemerintah harus berkelanjutan, kinerja juga harus ditingkatkan, karena segalanya selalu berubah dinamis”.* Semua negara (termasuk Indonesia) melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang makin profesional, cepat, efektif, adaptif agar mampu menjawab perubahan.

Apalagi dengan tumbuhnya era demokratisasi, masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, serta terangkainya visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju dan madani. Maka, reformasi birokrasi yang mendorong perubahan tata kelola pemerintahan, bukan lagi hanya untuk mengontrol perubahan di dalam birokrasi, namun juga untuk menghadirkan pelayanan, serta untuk memperbaiki paradigma administrator publik -- dimana: 1) masyarakat ditempatkan sebagai aspek terdepan dan prioritas; 2) memposisikan pemerintah sebagai representasi negara di ruang publik; 3) membangun institusi publik yang berintegritas, responsif melayani; 4) aktif memberdayakan rakyat dan sektor privat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kebijakan publik; serta 5) mengadopsi pola, metode dan skema tata kelola birokrasi yang semakin terbarukan sesuai konteks perubahan.

Saat mengikuti *World Government Summit* di Dubai, saya melihat langsung, bagaimana transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Untuk membangun *smart cities* di kawasan Timur Tengah dan Afrika, diperkirakan butuh biaya sebesar 2,7 miliar USD. Tahun 1998, Uni Emirat Arab sudah menangkap potensi ketidakpastian terbesar yang paling mengguncang ekonominya dimasa mendatang adalah fluktuasi harga minyak, sehingga Uni Emirat Arab beradaptasi cepat mengadopsi strategi reformasi yang mengubah fokus pemerintahan pada peningkatan sumber daya non minyak. Jalan utama yang ditempuh adalah membangun sektor privat melalui kerangka penguatan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan sektor privat dalam menciptakan teknologi dan infrastruktur yang mendukung energi bersih terbarukan, investasi pendidikan, kesehatan, air dan keamanan. Tahun 2019, Uni Emirat Arab mampu membangun Abu Dhabi dan Dubai sebagai pusat investasi dan wisata dunia, sebagai *smart city* yang menjembatani perekonomian antar negara di kawasan Timur Tengah, juga penghubung terbesar ekonomi Benua Asia, kawasan Timur Tengah dan Afrika. Uni Emirat Arab menjadi negara yang paling sejahtera di seantero kawasan Gulf (catatan indeks kesejahteraan tahun 2018).

Renungan kedua yang perlu dicermati, “ada yang mengatakan bahwa apa yang terjadi dan berlangsung di dunia nyata, sesungguhnya hanyalah yang tersisa dari dunia maya”. Pusat perbelanjaan terbesar dunia bernama amazon.com tidak punya bangunan mal. Perusahaan taksi terbesar di dunia bernama Uber, tidak punya mobil taksi sendiri, perusahaan Gojek tidak punya motor ojek sendiri. Omzet toko online (Lazada, Tokopedia, BukaLapak), melampaui penjualan *matahari departement store*. Banyak toko-toko digital di dunia maya yang menjangkau manusia di kawasan tak terbatas. Ratusan triliun uang bersliweran tak pernah kita lihat berupa kertas dan koin, uang itu hanya berupa angka digital yang berpindah. Pada titik perubahan ini, konsep pelayanan bukan lagi sebatas pertemuan fisik, namun dikembangkan diluar batas fisik yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik.



Secara akademis, Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt dari Arizona State University, mengungkapkan transformasi pelayanan publik di Amerika Serikat dan beberapa negara maju dalam mengatasi krisis di negaranya, dilakukan dengan menguatkan hubungan antara institusi publik dengan pelanggannya (masyarakatnya) sebagai “mekanisme transaksi pasar yang melahirkan suatu komoditas kepentingan bersama”. Inilah yang mereka lakukan untuk mendorong privatisasi fungsi publik dan menjaga kinerja pemerintah, membangkitkan efisiensi dan produktifitas, serta menghidupkan komitmen sekaligus akuntabilitas mesin kelembagaan negara. Bahwa jika hanya mengandalkan ruang fiskal dan keuangan negara, itu belumlah bisa dan belumlah cukup untuk menyulap kemajuan suatu negara, semua negara harus menggandeng sektor privat dan masyarakat.

Disinilah arti penting munculnya konsep *the new public service* di Indonesia dalam mengelaborasi pendekatan pelayanan negara yang lebih demokratis (berorientasi pada kepercayaan publik), menjembatani harapan rakyat, membuka ruang keterlibatan sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, serta membangkitkan legitimasi bagi pemerintahan. Secara gradual, *the new public service* di Indonesia semakin berkembang melalui *open government*.



Jika dalam kerangka demokrasi itu, Indonesia masih berorientasi mewujudkan kepuasan masyarakat, maka bayangkan birokrasi negara maju yang orientasinya adalah mewujudkan kebahagiaan bukan lagi sekedar mencapai standar kepuasan masyarakat!!!

Oleh karenanya, mau tidak mau, Indonesia harus cepat beradaptasi, pemerintah harus cepat mengubah tata kelola pemerintahan untuk mendinamisasi penyelenggaraan kebijakan publik yang mendekati kepuasan dan kebahagiaan masyarakat (sebagai sasaran utama). *Dynamic governance* harus digulirkan untuk menajamkan respon pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif dan efisien, serta mengakomodasi pemanfaatan teknologi yang terbaru. Bahkan untuk urusan regulasi, perizinan dan pelayanan publik, juga perlu didorong untuk makin cepat dan dinamis mengikuti pola perkembangan itu.

### **Bapak dan ibu sekalian,**

Fakta-fakta empirik bahwa pelayanan pemerintah itu berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis. Kualitas pelayanan publik sebagai hasil interaksi sistem, SDM dan strategi pelayanan serta kebutuhan pelanggan harus diramu dalam tata cara yang *entrepreneurship*, berorientasi hasil, menjawab kebutuhan mendasar, cepat, mudah, murah dan memuaskan warga.

Inilah *framework* yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia. Generasi pertamanya bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), lalu



generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mal pelayanan publik adalah generasi ketiga, yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat. Kehadiran mal pelayanan publik, dapat memayungi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya, peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak Mal Pelayanan Publik.

Jika pemerintah, sektor privat, dan masyarakat berjalan pada dimensi virtualisasi dan digital, mengapa tidak? Pemerintah juga mengubah pola pemerintahannya secara digital. Penerapan *e-government* dapat mengarahkan puncak tertinggi kepuasan masyarakat, karena publikasi informasi yang simpel, penyelesaian transaksi multipel yang sederhana, hingga terhubungnya transaksi sektor publik dan privat tanpa perlu berbelit. Artinya semua *by pass* dan akurat. Inilah mengapa, MPP juga sejalan dengan dibangunnya *online single submission* sehingga dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional.

Apalagi Pekanbaru adalah pusat minyak sawit dunia. Luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta hektar (terluas dunia) dengan kapasitas produksi 32 juta



ton CPO setiap tahun. Walaupun pernah digoyang isu deforestasi oleh Uni Eropa (dengan menggunakan isu minyak dari biji bunga matahari), namun komoditas sawit sebagai sumber energi sekaligus sumber devisa yang sifatnya *renewable/terbarukan*, merupakan salah satu strategi terpenting dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, saya sangat berharap MPP di Kota Pekanbaru dapat menopang kemudahan berusaha dan pelayanan publik utamanya pada sektor ini, termasuk sektor ekonomi lainnya.

### **Para hadirin yang berbahagia,**

Saya mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Upaya ini tidaklah mudah, butuh komitmen kuat dari level pimpinan atas hingga terbawah, butuh sinergi lintas instansi, perlu semangat yang tinggi untuk membawa seluruh SDM aparatur kepada level perubahan. *“Bukan oleh satu atau dua orang -- tetapi jika 4,17 juta ASN Indonesia melayani dengan sepenuh hati, maka kita akan melihat pelayanan publik yang luar biasa di Indonesia”*.

Pada akhirnya, selamat untuk didirikannya Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Saya mengajak seluruh *stakeholder* untuk ikut melanggengkan Mal Pelayanan Publik. Jaga dan rawatlah gedung ini, di dalamnya bangunlah sistem kerja dan sinergi yang utuh, ubahlah budaya kerja yang melayani, tampilkanlah wajah birokrasi yang mengadopsi *the new public service*, sehingga benar-benar merepresentasikan MPP sebagai jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan, kecepatan



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

elayanan dan kemudahan berusaha, menumbuhkan ekonomi makro, serta menjadi inkubator bagi tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi dan *leadership* yang melahirkan ASN teladan berjiwa *hospitality*.

**Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**POINTERS SAMBUTAN PADA ACARA  
“KEMENTERIAN PANRB MENDENGAR”**

**JAKARTA, 8 MARET 2019**

**Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian**

**Yang saya hormati:**

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- Para Hadirin yang Saya Banggakan.
- Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara **“Kementerian PANRB Mendengar”**.
- Tumbuhnya era demokratisasi, masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, serta menyongsong visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju dan madani. Maka, perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk memperbaiki paradigma administrator publik Indonesia.
- Kementerian PANRB mendengar merupakan wujud nyata dari tekad Kementerian PANRB untuk selalu berbenah dalam pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi. Selain itu, acara ini juga sebagai upaya untuk menyerap berbagai masukan dari *stakeholder* kunci agar kebijakan yang dihasilkan senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan global.
- Kami tidak pernah berpretensi bisa merumuskan sendiri kebijakan tanpa mendengar berbagai masukan dan informasi dari berbagai pihak terkait, sekaligus guna **memperluas dan mempertajam wawasan dan pengetahuan** seluruh jajaran Kementerian PANRB dalam berbagai hal.
- Kami memandang bahwa **‘mendengar’** adalah sebuah **tahapan yang krusial dalam upaya merumuskan kebijakan**, karena dengan **‘mendengar’** maka akan diperoleh informasi dan data yang akan membentuk kebijakan yang tepat dan baik. Menjadi pendengar yang baik adalah harapan kami.





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Bapak Menteri yang kami hormati,**

- Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Menteri untuk menjadi narasumber pertama kami dalam acara “Kementerian PANRB Mendengar” ini.
- Hal ini merupakan kehormatan bagi Kementerian PANRB untuk memperoleh masukan dan arahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 khususnya mengenai tujuan dan strategi pembangunan nasional yang akan kami jadikan panduan dalam menyusun kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- Telah hadir dihadapan Bapak Menteri untuk turut mendengarkan adalah jajaran pimpinan **BKN, LAN, ANRI, BPKP, KASN**, para pejabat JPT Madya dan Pratama Kementerian PANRB serta staf.
- Saya berharap kita semua pada siang hari ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kehadiran dan paparan Bapak Menteri untuk dapat kita pedomani bersama dalam menyusun kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan reformasi birokrasi, sekaligus nantinya dalam menyusun masukan bagi RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



**Bapak Menteri yang kami hormati,**

- Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Kementerian PANRB dan seluruh jajaran, serta badan dan lembaga yang hadir, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kehadiran Bapak Menteri untuk menjadi narasumber dalam acara ini. Dan kami siap mendengarkan.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**POINTERS RAPAT  
TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL  
JAKARTA, 8 MARET 2019**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Selamat Sore dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua**

**Yang saya hormati:**

- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Kepala Staf Kepresidenan;
- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Para Pejabat Eselon I; serta
- Para Hadirin Sekalian.

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan **“Rapat Tim Koordinasi SPBE Nasional”** sebagai **tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

**Para Menteri dan Kepala Lembaga, serta hadirin yang saya hormati,**

Pertemuan ini diadakan sebagai upaya meningkatkan kolaborasi dan keterpaduan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada kesempatan ini, ada 3 (tiga) pokok materi yang akan dibahas, yaitu:

1. Peran Tim Koordinasi SPBE Nasional;
2. Pelaksanaan percepatan SPBE dan rencana aksi;
3. Tindak lanjut terhadap komitmen bersama dan isu-isu.



**Hadirin yang saya hormati,**

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peranan Tim Koordinasi SPBE Nasional, antara lain:

- A. Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, memiliki tugas mengoordinasikan seluruh aktivitas SPBE nasional;
- B. Kementerian PPN/Bappenas sebagai anggota, dengan tugas mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan nasional, serta mengoordinasikan tata kelola dan manajemen data;
- C. Kementerian KOMINFO sebagai anggota, dengan tugas mengoordinasikan infrastruktur TIK SPBE;
- D. Kementerian Keuangan sebagai anggota, dengan tugas mengoordinasikan penganggaran SPBE;
- E. Kementerian Dalam Negeri sebagai anggota, dengan tugas mengoordinasikan proses bisnis Pemda dan mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda;
- F. BSSN sebagai anggota, dengan tugas melaksanakan keamanan SPBE;
- G. BPPT sebagai anggota, dengan tugas melaksanakan audit infrastruktur SPBE, serta menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi.

Berdasarkan Perpres SPBE, bahwa Tim Koordinasi SPBE Nasional memiliki 74 uraian tugas dan 29 uraian tugas pada Rencana Induk SPBE Nasional.

**Hadirin yang saya hormati,**

Salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan sesuai Pasal 62 sampai dengan Pasal 69 Perpres SPBE adalah melaksanakan percepatan SPBE, yang bertujuan untuk mempercepat penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi pemerintah.



Dalam hal ini, ada 2 (dua) *quick wins*, yaitu:

- A) *Quick wins* penerapan aplikasi umum, yang terdiri dari:
1. Integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
  2. Integrasi layanan kepegawaian;
  3. Integrasi layanan kearsipan;
  4. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik.
- B) *Quick wins infrastruktur SPBE*, yang terdiri dari:
1. Pusat data nasional;
  2. Jaringan intra pemerintah.



### Hadirin yang saya hormati,

Sehubungan dengan percepatan tersebut, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan:

1. Percepatan Layanan Penganggaran Berbasis Kinerja
  - Amanat Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 2 Oktober 2017 kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Sekretaris Negara terkait integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah;
  - Sesuai Perpres SPBE Menteri PPN/Bappenas berperan mengoordinasikan integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
  - Kementerian PPN/Bappenas perlu segera membentuk tim percepatan integrasi;
  - Integrasi tersebut agar dapat diselesaikan akhir Oktober 2020.
2. Percepatan Layanan Kepegawaian
  - Saat ini setiap instansi pemerintah telah memiliki sistem informasi kepegawaian, namun data kepegawaian belum terintegrasi dengan BKN.
  - Sesuai Perpres SPBE, Menteri PANRB berperan mengoordinasikan integrasi layanan kepegawaian dan membentuk tim percepatan integrasi bersama BKN, dengan target penyelesaian integrasi layanan kepegawaian adalah Oktober 2020.
3. Percepatan Layanan Kearsipan
  - Layanan kearsipan difokuskan pada sistem korespondensi (*e-office*) yang dapat melakukan pertukaran dokumen elektronik antar instansi pemerintah dan memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.
  - Sesuai Perpres SPBE Menteri PANRB berperan mengoordinasikan integrasi layanan kearsipan dan membentuk tim percepatan integrasi bersama ANRI, dengan target penyelesaian Oktober 2020.



#### 4. Percepatan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

- Aplikasi pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR! telah dibangun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan telah diserahkan kepada Kementerian PANRB untuk dikelola.
- Diperlukan standar pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi bagi semua instansi pemerintah.
- Sesuai Perpres SPBE Menteri PANRB berperan mengoordinasikan integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dan membentuk tim percepatan integrasi bersama Ombudsman dan KSP. Saat ini tim tersebut sedang menyelesaikan integrasi proses bisnis layanan pengaduan pelayanan publik.
- Target penyelesaian integrasi layanan pengaduan pelayanan publik Oktober 2020.

#### 5. Percepatan Infrastruktur TIK

- Pusat data nasional dimanfaatkan bagi instansi pemerintah untuk menempatkan sistem aplikasi, data, dan infrastruktur dalam rangka memberikan layanan SPBE.
- Perpres SPBE memberikan mandat kepada Menteri Kominfo untuk pembangunan pusat data nasional.
- Kementerian Kominfo telah melakukan identifikasi kebutuhan dan *feasibility studies* untuk pusat data nasional.
- Target penyelesaian pembangunan pusat data nasional adalah Oktober 2021.

#### Hadirin yang saya hormati,

Sebagai tindak lanjut dalam pertemuan ini, disampaikan hal-hal berikut:

1. Tim Percepatan SPBE perlu komitmen dan dukungan dari pimpinan kementerian/lembaga untuk penyelesaian percepatan SPBE pada masing-masing aplikasi umum dan infratraktur SPBE.
2. Menteri PANRB akan menetapkan aplikasi umum untuk diterapkan di masing-masing instansi pemerintah.
3. Diperlukan pertemuan rutin untuk memantau dan memastikan *quick wins* dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Tim Koordinator SPBE Nasional.
4. Isu anggaran
  - Perpres SPBE ditetapkan pada Oktober 2018, sehingga biaya percepatan SPBE untuk pembangunan aplikasi umum di tahun 2019 belum tersedia.
  - Anggaran untuk penyediaan lahan pusat data nasional juga belum tersedia.
5. Isu aplikasi sejenis
  - Saat ini banyak instansi pemerintah telah membangun dan mengembangkan aplikasi sejenis, sehingga memunculkan resistensi penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Para Menteri dan Kepala Lembaga, serta hadirin yang saya hormati,**

Saya harap pertemuan Tim Koordinator SPBE Nasional ini dapat terus terselenggara secara rutin sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi. Terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN (LAPORAN) PADA ACARA  
2019 INTERNATIONAL REFORM POLICY SYMPOSIUM  
AND REGIONAL WORKSHOP  
BALI, 14 MARET 2019**

**Your excellency:**

- Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla;
- Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani;
- Gubernur Bali dan DIY;
- Para Pejabat (Pimpinan Tinggi) Kementerian/Lembaga;
- Mr. In Jae Lee, Mr. Seong In Kim, and Mr. Seung Ho Kwon -- from Korea;
- Prof. O'donnell and Prof. Turner -- from Australia;
- Prof. Evan Berman -- from New Zealand;
- Mr. Pakorn Nilprapunt -- from Thailand;
- Prof. Emerlinda Roman and Ms. Alicia Dela Rosa -- from Philippines;
- Mr. Nguyen Ngoc Van -- from Vietnam;
- H.E. Youk Bunna -- from Cambodia;
- Mr. Viphongxay Khammoune -- from Laos;
- Mrs. Roslina Mokhtar and Prof. John Xavier -- from Malaysia;
- Mr. Ko Hlaing -- from Myanmar;
- Para Akademisi dari Universitas seluruh Indonesia;
- Para Praktisi Pemerintahan, serta
- Seluruh Hadirin yang Berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Good Morning,**

*Allow me to extend a warm welcome to Nusa Dua, Bali, hopefully, the beauty and peace of Bali may inspire the presence of the best practices of public administration reform from the region of Southeast Asia, Korea, Australia and Pasific -- as a strong foundation for government which is able to develop the country's capacity to responsively meet the challenges of global dynamics.*



### **Bapak Wakil Presiden RI dan hadirin yang berbahagia,**

Perjalanan tentang sejarah lampau, masa sekarang, masa depan, memasuki 2 (dua) momentum penting, yaitu: *globalisasi* dan *revolusi industri 4.0* (menurut riset *Mc Kinsey* -- *berdampak 3000 kali lebih dahsyat dari efek revolusi industri 1, pada abad 18 silam*).

Penggunaan teknologi dieksploitasi tanpa batas melalui rancangan masa depan dunia yang bukan lagi berada pada ruang fisik, namun "*masa depan virtual*" -- teknologi menjadi puncak transformasi peradaban manusia. Paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan.

Dampak transformasi pemerintahan sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik sehingga pemerintah percaya diri menjalankan program kerjanya, tidak hanya meningkatkan kapasitas negara untuk pembangunan nasional, bukan pula terbatas pada pondasi kebangsaan yang hebat untuk memenangkan persaingan global. Tetapi lebih dari pada itu, secara universal, bermuara pada "jaminan" agar masa depan peradaban manusia tetap stabil dalam pertumbuhannya, negara dan pemerintahannya tidak tenggelam oleh distorsi perubahan, waktu dan zaman.

Dunia sangat butuh transformasi pemerintahan, walaupun banyak terjadi kegagalan -- ada alasan kuat untuk tetap meyakini bahwa transformasi pemerintahan tetap penting dan harus menyentuh jantungnya, bukan hanya melalui birokrasi yang mekanistik, tetapi negara diposisikan sebagai "organisasi yang hidup", terdiri dari rakyat, hidup untuk melayani rakyat". Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi.



## MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, punya lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, 714 suku bangsa dengan 1.100 lebih budaya bahasa lokal, jumlah penduduk 270 juta jiwa, dengan menerapkan sistem pemerintahan yang sentralisasi di pusat serta otonomi di daerah (kombinasi desentralisasi), mengelola negara dengan postur 87 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 507 kabupaten/kota. Tentu karakter tata kelola negara Indonesia, sangat khas.

Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi Indonesia, telah dicapai:

- 1) Meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis TI;
- 2) Efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel, dan transparan;
- 3) *E-government* yang semakin masif;
- 4) Inovasi pelayanan publik yang cepat melayani; serta
- 5) Meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0., serta 10 tahun mendatang Indonesia menerima bonus demografi (66% penduduknya berusia produktif), maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang, dan menghadirkan kebijakan yang strategis, signifikan, dan fundamental, sehingga “momentum itu mendarat tepat pada landasannya”, menggapai Indonesia emas 2045. Kementerian PANRB menjadi sektor terdepan, *role model* sekaligus *prime mover* yang mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi.





Pada bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai *core bussiness* pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut **275.000 formasi jabatan** dari **6,8 juta talenta terbaik** menggunakan sistem *computer assisted test*. *Presidential lecture* bertujuan agar arah pembangunan langsung dikomunikasikan Presiden kepada aparatur. Sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional.

Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten/kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas. 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan *EODB* Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Indonesia mengembangkan SAKIP sebagai pondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif, dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensikan hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada *outcome* pembangunan daerah dan nasional. Kami yakin, program SAKIP dapat menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara *bottom up* setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, didirikan 14 Mal Pelayanan Publik serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N LAPOR!.



### **Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia,**

Besar harapan kami, *symposium* ini menjadi etalase bagi dimensi baru dari praktik tata kelola pemerintahan yang terbaik dan unik di Asia Tenggara, Indonesia, Korea, New Zealand dan Australia, sebagai proyeksi “*a unified strategy, the right system*” dan “*the right processes*” pengembangan kapasitas, komitmen, kapabilitas, kompetensi dan faktor keberhasilan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan negara.

Sebanyak 65 pembicara/narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan akan saling berbagi pengalaman, ide, dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah.

Dengan bangga, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa “ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya), tetapi mari kita belajar dari yang lain, mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan”.

Saya berterimakasih atas kehadiran para narasumber, para peserta, dan pihak penyelenggara yang menyukseskan acara ini, yang akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Mari menjadikan momentum ini sebagai perbaikan dan perluasan jaringan persahabatan antar aparatur negara, para akademisi, dan praktisi untuk semakin mendorong kapasitas negara yang sukses bertransformasi secara profesional.

Oleh karenanya, berkenan kami memohon arahan, petunjuk sekaligus arahan dari Bapak Wakil Presiden RI, agar kami mampu bertindak, kami bisa berbuat, kami dapat melakukan yang terbaik, melalui simposium ini untuk mempersiapkan bangsa dalam menyongsong masa depan.

**Sekian dan Terima Kasih,  
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**KEYNOTE SPEECH PADA  
KONGRES TEKNOLOGI NASIONAL 2019  
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
JAKARTA, 20 MARET 2019**

**Yang terhormat:**

- Kepala BPPT, Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc.;
- Para Deputi dan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan BPPT; serta
- Seluruh Hadirin yang Berbahagia.

**Assalamua'Alaikum, Wr. Wb.**

**Salam Sejahtera bagi Kita Semua**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri Kongres Teknologi Nasional 2019, sekaligus ucapan terima kasih atas undangan sebagai *keynote speaker* yang khusus menyajikan materi tentang “Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini, melibatkan kinerja 7 (tujuh) instansi secara bersama yaitu: Kementerian PANRB, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, BSSN dan BPPT, untuk mempercepat penerapan kebijakan SPBE pada instansi pusat dan daerah, dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045 yang maju dan modern.





### **Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Sebelum membahas tentang SPBE, saya ingin memberi gambaran pentingnya pengetahuan dan teknologi bagi masa depan peradaban umat manusia, termasuk pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan negara untuk menyangga kesejahteraan rakyat.

Dalam sebuah buku “Homo Deus, a Brief History of Tomorrow” yang ditulis oleh Yuval Noah Harari (2015), disampaikan perubahan fundamental dalam peradaban umat manusia yang tidak terlepas dari kehadiran teknologi. Sejarah dahulu, sebelum fajar millenium ketiga menyongsong, seluruh bangsa dan umat manusia di dunia dihadapkan pada tiga masalah besar yaitu: kelaparan, wabah, dan perang.

Kelaparan di India dan Mesir sejak abad pertengahan, memusnahkan 10% populasinya; memusnahkan 15% populasi Perancis pada tahun 1692 s.d. 1694; memusnahkan 1/3 populasi Finlandia pada tahun 1696; memusnahkan 20% penduduk Skotlandia di akhir tahun 1698. Wabah penyakit menular seperti maut hitam, menghancurkan 75 s.d 200 juta penduduk Eurasia pada tahun 1330; epidemi penyakit di Amerika, Australia, Pasifik menghabisi 90% populasi lokal; cacar memusnahkan 1/3 populasi Kuba dan Meksiko pada 1520; flu, tuberkulosis, tifus menghancurkan kemanusiaan di Hawaii, Amerika, Eropa, India, dan Kongo. Perang fisik seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, maupun perang dingin menghancurkan 15% peradaban umat manusia di zaman agrikultur kuno.

Sekarang, segalanya telah berubah, pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan nafas baru bagi umat manusia untuk mengatasi masalah itu. Terbalik realitanya, prediksi tahun 2030, setengah populasi manusia kelebihan berat badan. Wabah dikendalikan, bahkan bioteknologi telah “*memenangkan manusia dari virus dan bakteri*”. Perang fisik dihentikan oleh transformasi ekonomi global yang berbasis materi dan pengetahuan. Perang merebut minyak berubah menjadi ajang lomba raksasa teknologi. Teknologi telah memberikan ras manusia keberlimpahan makanan, obat, energi dan bahan baku; mengembangkan kapasitas bumi dalam mendukung kehidupan manusia; kemutakhiran pengetahuan bahkan meningkatkan level kehidupan manusia menjadi dewa-dewa (*homo deus, diatas homo sapiens*).

Petikan pesan dari buku tersebut, adalah “teknologi telah merubah peradaban, bahkan memuncaki peradaban manusia itu sendiri”. Saat acara *World Government Summit* di Dubai (Februari, 2019), saya mencermati, rancangan masa depan dan modernisasi bangsa tidak terlepas dari tumpahan gelombang dinamika global, kawasan, dan nasional yang selalu berubah, penuh ketidakpastian, kompleks, dan penuh ambiguitas karena hadirnya teknologi terbaru. Masa depan dunia bukan lagi berada pada ruang fisik, namun “masa depan virtual”.





Para ilmuwan berpacu menciptakan spesies baru melalui proyek Humans 2.0., tubuh dan pikiran manusia dikembangkan dengan tanpa batas kelemahan. Tahun 2040, *beta body* -- tubuh manusia dikembangkan lebih kuat, pintar, produktif, dan memuaskan kehidupan. Tahun 2060, *beta mind* -- teknologi mengintegrasikan pikiran dan komunikasi manusia, otak terhubung langsung dengan alat eksternal sehingga manusia menjadi serba tahu “secara instan”.

Tahun 2080, *meta body* -- detail pikiran manusia dipetakan dan diproduksi ulang secara biologis, digital maupun robotika, kemanusiaan jauh melampaui galaksi,



manusia menjadi kreator bagi lainnya, menyaingi realitas di dunia digital dan tanpa batasan kemungkinan. Tahun 2100, dirancang *meta mind* -- tidak bisa dipersepsikan lagi peradaban manusia, “*benarkah manusia seperti dewa, segalanya?*”.

PM Jepang, Shinzo Abe, mengenalkan *Super Smart Society* atau Generasi *Society 5.0.* pada event The CeBIT 2017. Sebagai negara dengan

penuaan tercepat, pada tahun 2050, 40% populasi Jepang diprediksi mencapai umur 65 tahun ke atas. Tantangan Jepang, bukan lagi dengan strategi penambahan jumlah penduduk, tetapi menggantikan manusia dengan robot/*artificial intelligence*. Jepang punya rencana umum pengembangan sains teknologi per lima tahun untuk menghadapi penuaan populasi, perubahan iklim, ketidakstabilan energi, pangan, dan air dunia.

Arab Saudi -- melalui sentuhan tangan dingin Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, membangun visi 2030 untuk mereformasi tatanan negara, budaya bahkan sejarah dan arah pembangunan kerajaannya, yang tidak lagi bergantung dari pasokan minyak bumi, tetapi merintis kemajuan baru melalui mega proyek NEOM, kota masa depan di suatu kawasan khusus seluas 26.500 km<sup>2</sup> di dekat Laut Merah, dengan gaya hidup modern, kosmopolitan, penuh ruang publik yang gaul untuk anak muda, tempat konser musik, pantai pasir putih, dan destinasi wisata yang menyerap investasi dunia.

Tiongkok -- kekuatan baru dunia yang *head to head* berperang dagang dengan Amerika Serikat, juga aktif melakukan riset teknologinya. Rencana peluncuran bulan buatan ke angkasa tahun 2020 oleh lembaga penelitian sains Chengdu Aerospace akan menyediakan cahaya delapan kali lebih terang dari bulan asli menerangi 80 km Kota Chengdu, sumber energi kelistrikan untuk menerangi kota sekaligus daya tarik wisata dunia.

Ilmuwan Tiongkok juga membentuk koridor iklim yang memindahkan butiran air hujan ke daerah Gurun Gobi yang tandus, diubah menjadi tanah yang basah, subur, dan produktif untuk pertanian. Lahan penghidupan baru bagi generasi muda produktif Tiongkok pada saatnya nanti.



**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Indonesia menghadapi dua isu besar yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia untuk mampu meraih keemasannya pada tahun 2045. Pada tahun 2030, populasi penduduk Indonesia akan dipuncaki oleh proporsi usia produktif mencapai 179 juta jiwa (67,6%), didalamnya tumbuh 63,4 juta jiwa (24%) generasi milenial, postur SDM yang berpikiran maju, inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi ini akan menjadi tonggak kekuatan utama bangsa.

Revolusi industri 4.0 menjadi “ruang dan area bermain utama” bagi para generasi millennial dalam upaya pembangunan bangsa di masa depan. “Ibarat organisme dan ekosistemnya, yang paling cocok hidup dalam habitat era digitalisasi dan virtualisasi, adalah generasi milenial, kepada merekalah nasib bangsa ini akan bertumpu”.

Riset Mc Kinsey (2015) menyebutkan bahwa dampak revolusi 4.0 akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada efek revolusi industri 1 pada abad 18 silam. Bagi Indonesia, kita harus optimis bahwa kombinasi kedua isu strategis itu akan meledakkan kemampuan bangsa di mata dunia. Saingan generasi muda bukan lagi pekerja asing terampil, tapi robot dan kecerdasan buatan. Yang tersisa nanti, hanyalah pekerjaan yang sulit dijangkau oleh teknologi seperti pikiran kritis, kemampuan berkomunikasi, analisis riset, bekerja sama, fotografi, videografi, menulis dll.

“Tidak ada jalan untuk mundur, yang ada hanyalah jalur untuk menapaki masa depan”. Tidak ada pilihan lain, anak bangsa Indonesia, selain bekerja keras dan cerdas dan selalu meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Indonesia bekerja keras menyiapkan pondasi pengetahuan dan teknologi bangsa di masa mendatang. Megaproyek Palapa Ring -- 35.280 km kabel serat fiber optik di bawah laut dan 21.000 km kabel serat fiber optik di darat dibangun untuk menghubungkan konektivitas internet wilayah barat, tengah, dan timur.

Satelit Nusantara Satu diluncurkan dengan Roket Space X Valcon 9, melintasi orbit bumi di atas langit Papua, dikendalikan oleh ruang kontrol di Purwakarta, untuk meningkatkan konektivitas internet *broadband*, pita suara, komunikasi, data dan video yang menjangkau seluruh kepulauan nusantara.

Maka, tidak ada lagi waktu bagi kita berpangku tangan, semuanya harus bergegas, bahu-membahu mengembangkan pengetahuan dan teknologi, termasuk menyerapnya dalam penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang lebih modern dan maju, agar pemerintah dan negara tidak tenggelam oleh distorsi perubahan, waktu, dan zaman.

**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

*E-Government* kita bangun secara masif, percepatan untuk implementasi kebijakannya makin disempurnakan. Walaupun ada beberapa permasalahan teknis, seperti: 1) belum terciptanya budaya *sharing* sistem dan informasi yang integratif, 2) belum ada standardisasi sarana TIK; serta 3) belum terpadunya pengelolaan sistem keamanan data dan informasi. Namun, Tim Koordinasi SPBE Nasional, berjuang maksimal agar target waktu untuk percepatan di bidang penganggaran berbasis kinerja, kepegawaian, kearsipan, pengaduan masyarakat dan infrastruktur TIK dapat



diselesaikan dalam 2 tahun mendatang, serta infrastruktur TIK juga dapat diselesaikan dalam 3 tahun mendatang.

Upaya percepatan penerapan aplikasi umum berbagi pakai pada 4 area tersebut, serta penerapan aplikasi umum akan menjadi *core* pelaksanaan SPBE yang terpadu secara menyeluruh.

BPPT berperan penting dalam manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus memastikan alih teknologi yang mendorong efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE. Karenanya, besar harapan saya, Kongres Teknologi 2019, menjadi momentum pendorong dan penggerak utama SPBE di Indonesia.

Selanjutnya, Kementerian PANRB akan melaksanakan e-Gov Summit (pada 28 Maret 2019), untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah, memberikan saran perbaikan, serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE, melalui suatu metodologi, nilai indeks dan distribusi nilai yang mengadopsi keterpaduan antara kebijakan, tata kelola dan layanan yang telah ada di masing - masing instansi pusat maupun daerah.

Mari membuat sesuatu perubahan yang luar biasa, butuh kerja keras, komitmen kuat dan semangat yang pantang menyerah untuk mewujudkan SPBE yang terpadu di Indonesia. Ini adalah jaminan bagi langgengnya tata kelola pemerintahan, yang menopang kemajuan negara dan kesejahteraan bangsa di masa depan.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**KULIAH UMUM IPDN  
TENTANG REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN  
YANG BERSIH, MODERN, DAN MELAYANI  
JATINANGOR, 26 MARET 2019**



**Yang saya hormati:**

- Mendagri, Bapak Tjahjo Kumolo;
- Rektor IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi;
- Para Dosen dan Mahasiswa IPDN yang Berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, kita dapat hadir pada kuliah umum di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dalam rangka *sharing* pembekalan sekaligus membuka cakrawala terkait reformasi birokrasi kepada para praja, tunas aparatur negara di masa mendatang, yang nantinya bertugas menggerakkan reformasi birokrasi pemerintahan.



### **Para praja dan hadirin yang saya banggakan,**

Konstelasi dan dinamika pada tataran global dan kawasan, dalam kerangka *megatrends global*, yang identik dengan evolusi, perubahan, dan ketidakpastian (seperti: ketersediaan pangan, air bersih dan energi; perubahan iklim; politik global dan ekonomi makro; globalisasi, revolusi teknologi 4.0., transisi demokrasi dan urbanisasi global dalam perlintasan peradaban) telah menciptakan gelombang perubahan dahsyat bagi *landscape* internal suatu negara.

Oleh karenanya, seluruh bangsa di dunia, semua bentuk pemerintahan negara (yang orientasinya meningkatkan kesejahteraan rakyat), harus melakukan *shifting* -- proses adaptasi yang strategis dan fundamental pada tata kelola negaranya, untuk menjadi semakin dinamis, profesional, modern, akuntabel, efektif, efisien, serta berkinerja tinggi.

Sesungguhnya perubahan itu sudah ada sejak dahulu, jejaknya bisa ditapak tilas melalui catatan sejarah dunia, dimana berbagai imperium besar dunia, seperti Romawi dan Yunani Kuno, Ottoman, Mongolia, Britania Raya, Kekaisaran Perancis dan Spanyol, dan banyak lainnya -- di era-nya, silih berganti memuncaki peradaban, lalu setelah melampaui puncak kejayaan, terlebur menjadi pecahan kecil (menandai suatu kerajaan besar berubah menjadi banyak negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda).

Lalu, *Clash Of Civilization* oleh Samuel Huntington, juga menggambarkan tentang runtuhnya perang dingin, yang ditandai oleh “kemenangan” Amerika Serikat dengan ideologi demokrasinya, telah menciptakan gelombang besar bernama badai demokrasi “membasuh” seluruh *landscape* global, menciptakan banyak peristiwa penting tentang drastisnya perubahan sistem pemerintahan di banyak negara. Uni Soviet runtuh, banyak negara *non western* mengikuti “bentuk” dunia barat. Bahkan Cina yang kuat sekarang ini, tumbuh pesat setelah menggeser “komunisme-nya” menjadi “kapitalis” yang dalam banyak pembahasan hampir identik dengan demokrasi.

Termasuk Indonesia, demokrasi adalah salah satu sila yang diakui sebagai falsafah negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Namun, seiring berjalannya periode kebangsaan, sistem pemerintahan juga berubah-ubah. Tahun 1998, peristiwa reformasi, menjadi tonggak penting perubahan negara untuk semakin terbuka, pemerintahan diorientasikan dari, oleh, untuk rakyat, fokus bekerjanya negara dan lembaga pemerintah diubah untuk menyentuh langsung jantung harapan publik, “bingkai” keberhasilan kinerja diukur dari kepuasan masyarakat, mekanisme tata kelola pemerintahan harus lebih baik dan dinamis untuk menghadapi perubahan yang sejatinya tidak pernah berhenti, namun langgeng, bahkan diprediksi memasuki dimensi peradaban yang semakin terbaru.





### **Para praja dan hadirin yang saya banggakan,**

Bagaimanakah cara menghadapi perubahan itu? Sebuah pertanyaan menarik, yang secara filosofis saya temukan jawabannya saat menghadiri *World Government Summit* di Dubai, bulan lalu, dari pembicara bernama Simon Sinek, seorang *leadership expert* dari London, Inggris.

Disebutkanlah teori "*the finite and infinite game*" atau "permainan terbatas dan permainan tidak terbatas" untuk menjelaskan bagaimana idealnya upaya yang dilakukan oleh suatu negara (seluruh bangsa) untuk membangun pemerintahan yang sangat kuat dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyatnya.

Simon Sinek menjelaskan, "*permainan terbatas atau finite game*", memiliki pemain yang jelas, aturan yang kaku, semua pemain di dalamnya menyetujui tujuan bersama - seperti permainan olahraga pada umumnya, semuanya mengejar kemenangan, dan setelah kemenangan itu datang, semuanya bubar. Lalu, permainan berikut dan berikutnya akan datang silih berganti. Mereka hanya pakem dengan permainan pada satu bidangnya saja -- seperti, apakah pemain sepakbola bisa bermain bisbol? Belum tentu.

Sangat berbeda dengan "*permainan tidak terbatas -- infinite game*", yang memiliki ragam karakter pemain yang nyata juga abstrak, aturan main selalu berubah, tujuan mereka untuk mempertahankan permainan itu sendiri, para pemain tetap bertahan untuk berada di dalam permainan yang tidak pernah berhenti itu.

Saat "*pemain finite game (pemain terbatas)*" menghadapi "*pemain infinite game (pemain tidak terbatas)*", maka yang terjadi adalah "*pemain terbatas*" akan frustrasi dan kalah, karena mereka hanya bertujuan mencari kemenangan. Sedangkan, "*pemain tidak terbatas*" menjadi pemenang karena bermain stabil, mereka bertahan walaupun dalam skema permainan yang berubah dan tidak pernah berhenti.

Dalam skema peperangan, terjadi saat Perang Vietnam -- tentara Amerika sebagai "*pemain terbatas*" kalah dari pasukan Vietnam sebagai "*pemain tidak terbatas*" -- Amerika berjuang untuk mengalahkan Vietnam, sebaliknya prajurit Vietnam berjuang untuk bertahan hidup, hingga pasukan terakhir. Saat pasukan Soviet menghadapi Mujahidin di Timur Tengah, mereka mundur karena Mujahidin sebagai "*pemain tidak terbatas*" berjuang untuk kehidupan panjang di masa depan, sedangkan pasukan Soviet sebagai "*pemain terbatas*" berjuang hanya untuk mengalahkan Mujahidin.

Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu "*area never ending atau infinite game*", karena didalamnya dialiri "*nafas perubahan*" yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman, tidak pernah berhenti hingga mencapai titik kesempurnaannya. Sistem ini langgeng, didalamnya akan selalu datang silih berganti generasi yang akan menjalankannya. Buktinya, sejak merdeka -- kita sudah menjadi generasi yang kesekian -- yang menjalankan pemerintahan. Begitu juga di masa depan, akan ada generasi yang menjalankannya. Para praja, adalah embrio generasi aparatur yang melanjutkan perjuangan menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang.

Maka, untuk menghadapi skema reformasi birokrasi dalam menghadapi arus perubahan yang tidak berujung ini, untuk melanggengkan eksistensi negara menghadapi dinamika global yang tiada pernah berakhir -- aparatur negara harus menjadi "pemain yang bermain pada area yang tidak dibatasi oleh waktu, harus



mencapai kinerja yang maksimal, selalu beradaptasi dengan perubahan aturan, dan tidak terikat batasan kemenangan yang ingin diraih”.

*Mindset* aparatur negara harus diubah, mereka bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk penghargaan, bukan untuk predikat prestasi dalam bentuk angka. “Sejatinya, aparatur negara bekerja untuk berjuang demi kehidupan, untuk peradaban panjang yang lebih baik dan jauh ke depan, untuk masa depan kemanusiaan, kehidupan yang lebih baik untuk anak dan cucu kita”.

Inilah aparatur sipil negara, yang mampu beradaptasi, menjadi *leader* dan membawa perubahan fundamental untuk organisasinya, yang menggerakkan reformasi birokrasi untuk berjalannya pemerintahan yang lebih baik.

### **Para praja dan hadirin yang saya banggakan,**

Penting untuk mengetahui isu strategis dunia dan arah pemerintahan ini bergerak. Pemerintah Indonesia menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu: 1) pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, 2) pemerintah yang efektif dan efisien, serta 3) pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Indonesia berhasil meningkatkan daya saing bangsa, pada tahun 2017, melonjak dari peringkat ke-40 menjadi ke-36. Skor indeks kemudahan berusaha juga meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 di tahun 2018. Indeks persepsi korupsi dijaga stabil dengan skor 37 di tahun 2017. Indeks efektivitas pemerintahan naik 17 level dari peringkat 103 ke peringkat 18 dari tahun 2015 s.d. 2017.

Kemajuan reformasi birokrasi, diukur melalui survei penentuan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi. Hasilnya, persepsi publik terhadap postur pelayanan dan anti korupsi terjadi kenaikan di semua level pemerintahan. Ini adalah momentum yang baik, menandakan kepercayaan, kepuasan dan legitimasi publik terhadap pemerintahan di alam demokrasi -- sumber kepercayaan diri pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Capaian tersebut diraih, melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola negara.

*Pertama*, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam 2 (dua) tahun terakhir, berhasil memfokuskan 106 triliun rupiah anggaran untuk prioritas pembangunan di pusat dan daerah, serta membangun kemandirian daerah dalam meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Efisiensi birokrasi terus diperbaiki, 351 unit percontohan zona integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dibangun secara masif, penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran terus dilanjutkan.

Program SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan wilayah otonomi khusus sebagai pusat ekonomi yang menyangga kemajuan negara. Inilah kunci kemajuan suatu negara -- Amerika maju bukan karena Washington tetapi membangun wilayah ekonomi khusus yang otonom, Cina juga membangun ekonominya melalui revolusi ekonomi yang berpusat di wilayah.

Kedua, modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, tetap diorientasikan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Ribuan inovasi pelayanan publik dirangsang lahir secara *bottom up* setiap tahunnya.

Ketiga, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipercepat agar semua terkoneksi, jika berhasil ini akan mendorong integrasi, percepatan tata



kelola serta penghematan anggaran negara yang sangat besar, artinya semakin cepat SPBE rampung, maka postur anggaran akan semakin efisien, efektif dan fokus pada ruang pembangunan nasional.

Keempat, manajemen SDM ASN dirancang lebih akurat sesuai *core bussiness* pembangunan nasional. Selama dua tahun terakhir direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem *computer assisted test*. *Presidential lecture* dan *sharing* seperti sekarang bertujuan agar arah pembangunan langsung dikomunikasikan pejabat pemerintah kepada aparatur. Sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional.

### **Para praja dan hadirin yang saya hormati,**

Indonesia menghadapi dua isu besar yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya tahun 2045. Populasi penduduk Indonesia akan dipuncaki oleh proporsi usia produktif mencapai 179 juta jiwa (67,6%), didalamnya tumbuh 63,4 juta jiwa (24%) generasi milenial -- termasuk para praja IPDN yang ada di hadapan saya sekarang.

“Jaminan utama bagi masa depan bangsa, bukanlah sumber daya alam yang dimiliki negara itu, tetapi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa”. Studi World Bank, menyatakan bahwa di seluruh negara maju, kekayaan SDM adalah proporsi terbesar dari total kekayaan negaranya. Contohnya: Singapura, Swiss, New Zealand dan banyak negara lainnya, mereka bisa maju bukan karena sumber daya alam, tetapi karena keunggulan sumber daya manusia.

Dalam konteks revolusi industri 4.0, digitalisasi dan virtualisasi akan menjadi “ruang dan area bermain utama” generasi milenial dalam membangun bangsa di masa depan. “Ibarat organisme dan ekosistemnya, yang paling cocok hidup dalam habitat era digitalisasi dan virtualisasi, adalah generasi milenial (termasuk anda), dan kepada andalah nasib bangsa ini akan bertumpu”. Sedangkan, saya dan generasi tua lainnya nanti, hanya bisa melihat dan menanti apa yang dilakukan generasi penerus untuk negara.

Riset Mc Kinsey (2015) menyebutkan bahwa dampak revolusi 4.0 akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada efek revolusi industri 1 pada abad 18 silam. Maka, seluruh generasi muda harus optimis mengombinasikan kedua isu itu guna meledakkan kemampuan bangsa di mata dunia. Saingan anda nanti bukan lagi pekerja asing terampil, tapi robot dan kecerdasan buatan. “Tidak ada jalan untuk mundur, yang ada hanyalah jalur untuk menapaki masa depan”. Tidak ada pilihan lain, selain bekerja keras dan cerdas dan selalu meningkatkan kualitas sdm bangsa melalui adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi -- yang dimulai sejak anda berada di lembaga pendidikan IPDN.

Pengalaman karier -- sebagai Kalemdiklat Polri, saya melihat pentingnya membangun kapasitas 450 ribu SDM Polri untuk membangun masa depan “organisasi penjaga keamanan negara” itu. Sebagai Menteri PANRB, saya juga berupaya kuat membangun kapasitas 4,3 juta ASN ke arah smart ASN guna menyangga dinamisasi arah tata kelola negara dan pemerintah, serta eksistensi bangsa Indonesia di tengah gejolak perubahan masa depan dunia.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Inilah yang sedang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri -- menyiapkan putra/putri terbaik, untuk diberikan, dididik, dan dilatih tentang pemerintahan. Sejumlah 7 (tujuh) lembaga pendidikan kedinasan lainnya juga melakukan proses yang sama, menginkubasi tunas SDM menjadi matang secara sempurna. Dapurnya disini, saya yakini, sesungguhnya itulah kunci perubahan bagi tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Mengakhiri kuliah umum ini, saya ingin mengulang pesan yang pernah diutarakan oleh *the founding father* Ir. Soekarno, yaitu: “beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia”. Betapa kekuatan pemuda, anak bangsa, generasi penerus (termasuk praja IPDN) adalah tulang punggung yang utama bagi masa depan Indonesia.

Maka, belajarlah dengan penuh semangat, berlatihlah dengan tekun, jangan mengejar prestasi di kampus saja, tetapi kembangkanlah kreativitas dan cita-cita untuk menghasilkan karya demi karya terbaik dari waktu ke waktu, jadilah agen perubahan yang langgeng sebagai mesin dinamisasi pemerintahan dalam menjawab perubahan global, karena itulah simbol pengabdian anda sebagai “*pemain tidak terbatas*” dalam membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemajuan bangsa, serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN**  
**PENANDATANGANAN KOMITMEN DAN RAPAT KOORDINASI**  
**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**  
**JAKARTA, 27 MARET 2019**

**Yang saya hormati:**

- Sekretaris Kementerian, Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus pada Kementerian PANRB;
- Para Bupati dan Wali Kota;
- Para Dirjen pada Kementerian dan Lembaga;
- Para Dirut Badan Usaha Milik Negara dan Daerah; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri acara penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bersama dengan para pimpinan dari Kementerian, Lembaga BUMN dan BUMD, serta kepala daerah dari 26 wilayah, yang menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Hadirin yang saya hormati,**

Globalisasi telah mengubah peta dunia menjadi *borderless* (tanpa sekat dan batas). Seluruh masyarakat bersatu dalam komunitas global, termasuk berkembangnya pengalaman masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang dihadirkan oleh sektor privat di Indonesia maupun di banyak negara maju.

Selain itu, konsep pembangunan nasional yang sejatinya dibangun melalui kerangka partisipasi seluruh generasi bangsa, juga memasuki dimensi baru sehingga melahirkan konkretisasi *open government*, yang bertumpu pada pilar kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat. Dampaknya, semakin masyarakat berinteraksi dengan sektor privat, mereka semakin mendapatkan pengalaman dan melihat langsung, bagaimana pola dan standar pelayanan dari sektor privat.

Kondisi tersebut mendorong pergeseran harapan publik, keinginan masyarakat, yang juga menginginkan perubahan standar pelayanan publik pemerintah, agar sama kualitasnya dengan standar yang dihadirkan oleh sektor privat. Jika orientasi sektor privat adalah bisnis, menjalankan operasional pelayanan *entrepreneurship* -- cepat, efektif, dan tepat sasaran. Maka, demikian pula yang diinginkan masyarakat terhadap postur pelayanan pemerintah, yang perlu dikombinasikan dalam bentuk



*enterprise* birokrasi yaitu pelayanan cepat, tepat, berkualitas, tidak berbelit, aksesibilitas mudah, dsb.

Oleh karenanya, bidang pelayanan publik sebagai salah satu sasaran utama reformasi birokrasi, harus ditumbuhkan secara progresif baik kuantitas maupun kualitasnya, agar tetap dapat “mengaliri” jantung harapan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan, kepuasan, bahkan meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

Pelayanan publik jangan hanya dilihat secara terbatas pada bagaimana cara aparaturnya melakukan tugas rutin pelayanan kebutuhan publik. Tetapi lebih dari pada itu, menjadi suatu simbol kehadiran negara untuk rakyatnya, sistem yang mendorong kapasitas negara untuk mensejahterakan rakyatnya, menjadi “mesin utama” pendorong modernisasi dan kemajuan bangsa.

Hal ini jelas, bahwa melalui pelayanan yang baik, seluruh kegiatan masyarakat yang bernilai ekonomis akan mudah dan aman, dijamin hadir dalam tampilan pelayanan pemerintah, masyarakat akhirnya puas dan percaya bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka. Pada akhirnya, pemerintah pun makin percaya diri menjalankan roda pembangunan di pusat maupun daerah.



### **Bapak dan ibu sekalian,**

Kinerja pemerintahan akan selalu ditarik kuat oleh “pusaran” perubahan harapan masyarakat. Apalagi dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 yang didominasi oleh digitalisasi dan virtualisasi, generasi milenial tumbuh dengan semakin fasih menggunakan teknologi yang terbaru untuk semua kepentingannya. Maka, jelas terlihat ada perbedaan, jika pelayanan dahulu dilakukan melalui membangun gedung yang mewah, nyaman, sejuk, dsb., sekarang semuanya telah berubah, pelayanan diukur melalui kecepatan, akses cepat, mudah, terintegrasi dari pusat ke daerah. Jika perlu, pelayanan publik oleh pemerintah dapat digabungkan dengan teknologi, hanya dengan klik tombol tertentu dalam aplikasi teknologi, namun tetap menjaga kearifan lokal setempat.

Kementerian PANRB sudah merangsang tumbuhnya berbagai inovasi seperti itu, sudah baik hasilnya dan terukur secara kuantitas, dalam 4 (empat) tahun terakhir. Begitu pula dengan didirikannya Mal Pelayanan Publik (MPP), yang sudah berjalan pada tahun kedua, dan sekarang, sudah ada 14 Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia.

Inti dari kebijakan MPP adalah upaya untuk memberikan alternatif pelayanan yang terintegrasi dan terpadu, mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia, tersebar di 17.000 pulau, berdiam di 34 provinsi, serta 507 kabupaten/kota.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam perjalanannya, tentu perlu dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini karena diseminasi pelayanan yang baik, bukan hanya dihitung secara kuantitas, tetapi sejatinya kita perlu membangun Mal Pelayanan Publik yang tangguh kualitasnya.

Butuh kerja sama, komitmen, dan kesamaan frekuensi pandangan, baik penyelenggara, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal maupun BUMN/BUMD, serta pihak swasta, tentang penguatan regulasi berupa Peraturan Presiden maupun aksi operasionalisasi Mal Pelayanan Publik secara lebih komprehensif. Konsep dan model integrasinya perlu dikembangkan, sistemnya perlu disempurnakan, infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, diperlukan instrumen evaluasi untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik secara akurat.

Inilah fokus yang harus dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Saya berharap akan terjadi diskusi silang yang konstruktif, komunikasi yang terbuka, serta *sharing knowledge* dan berbagi pengalaman (*best practices*), untuk memformulasikan strategi pengembangan Mal Pelayanan Publik terbaik di masing-masing Pemda.

Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta termasuk para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menyatukan tekad, semangat, pikiran dan kinerja kita, untuk membangun postur pelayanan yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



## LAPORAN PENYERAHAN HASIL EVALUASI SPBE JAKARTA, 28 MARET 2019

### Yang saya hormati:

- Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Para Menteri Kabinet Kerja;
- Ketua Komisi II DPR RI;
- Para Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kapolda, Gubernur, Bupati dan Walikota; serta
- Tamu Undangan yang Berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, serta terima kasih atas perkenan kehadiran Bapak Wakil Presiden RI serta seluruh tamu undangan, yang di tengah kesibukan, berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) -- potret faktual kematangan implementasi SPBE pada 616 instansi pusat, Pemda, dan Polri.





**Bapak Wakil Presiden yang saya hormati,**

Peradaban panjang umat manusia, yang didalamnya berjalan “mekanisme” tentang perkembangan tata kelola pemerintahan negara di seluruh dunia sedang memasuki fase transisi yang sangat cepat, seluruh institusi, organisasi bahkan negara berjuang untuk bertahan dalam skema perubahan global yang tiada berhenti adanya.

Francais Fukuyama (2017) menyatakan bahwa “realitas pergeseran sosial yang diakibatkan oleh migrasi global, persaingan antar negara, perubahan iklim dan utamanya: teknologi, akan jadi penentu munculnya pemerintahan global”. Di sisi lain, pergeseran “hubungan internasional”, telah melahirkan organisasi *non-state* atau bahkan organisasi lainnya yang spesial, fleksibel, adaptif yang lebih cepat Bergeraknya -- dibandingkan dengan organisasi besar bahkan “suatu negara”.

Dalam dimensi globalisasi yang multi-multi-lateral, tidak ada satupun organisasi atau negara yang mampu menjadikan dirinya absolut atau *powerful*. Termasuk, tata kelola pemerintahan yang tidak bisa lagi hanya berkutat tentang “konteks negara dan rakyat”, tetapi sudah mengarah kepada “bagaimana suatu bangsa, dapat bertahan di tengah perubahan dan persaingan global, Indonesia menjadi bangsa yang maju dan madani (seperti visi Indonesia emas 2045).



Sebuah pertanyaan penting, apakah seluruh pemerintahan dunia sudah siap untuk sebuah masa depan yang dinamis? Bagaimana dengan Indonesia?

**Bapak Wakil Presiden RI yang saya hormati,**

Kecepatan transformasi teknologi (yang sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0) semakin tinggi, perubahan teknologi menjadi kekuatan yang paling terkuat di dunia. Maka teridentifikasi bahwa “sesungguhnya kunci kesiapan pemerintah itu, adalah tentang bagaimana menyerap “teknologi sebagai unsur penyempurnaan”.

Dalam forum ini, fokus yang ingin digaungkan adalah tentang membangun iklim kerja pemerintahan dari pusat hingga daerah, agar mampu mengambil peluang positif yang ditawarkan oleh kehadiran teknologi. Kami sungguh menyadari dan tidak ingin “kecolongan” oleh kecepatan perubahan yang dihadirkan oleh teknologi. Kami tidak ingin kehilangan momentum yang potensial ini.

Oleh karenanya, “Indonesia harus segera melakukan lompatan yang progresif dan masif, membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi secara paripurna”.

Evaluasi SPBE akan memberikan potret tentang kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan Pemda. Melalui evaluasi SPBE, akan didapat data tentang *baseline* pelaksanaan SPBE nasional, yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan target, indeks SPBE nasional diharapkan mencapai kategori predikat baik, yaitu “*lebih besar dari sama dengan 2,6*”. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari



616 kementerian/lembaga/daerah/Polri → sebanyak 82 instansi pemerintah (atau 13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (atau 86,69%) berpredikat cukup dan kurang.

Dari 34 kementerian, 74% instansi indeksinya diatas 2,6 (baik, sangat baik, memuaskan), sedangkan 26% instansi indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang). Dari 27 LPNK, 53% instansi indeksinya diatas 2,6 (baik, sangat baik), sedangkan 48% instansi indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang). Dari 29 lembaga lain, 3,4% instansi indeksinya diatas 2,6 (sangat baik), sedangkan 96,6% instansi indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang).

Dari 34 Polda, 12% Polda indeksinya diatas 2,6 (baik), sedangkan 88% Polda indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang). Dari 34 provinsi, 41% instansi indeksinya diatas 2,6 (baik, sangat baik), sedangkan 59% instansi indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang). Dari 370 kabupaten, 8% instansi indeksinya diatas 2,6 (baik), sedangkan 92% instansi indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang). Dari 88 kota, 25% instansi indeksinya diatas 2,6 (baik, sangat baik), sedangkan 75% instansi indeksinya dibawah 2,6 (cukup, kurang).

### **Bapak Wakil Presiden RI yang saya hormati,**

Kami ingin menggunakan momentum ini sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan, oleh seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah/Polri. "Hari ini, disini, akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik".

Gambaran di atas bukan tentang siapa yang baik/jelek, yang menang/kalah, yang berprestasi/tidak, tetapi sesungguhnya landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. "Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua. Semua pimpinan instansi dari pusat hingga daerah harus mendukung akselerasi SPBE pada 3 (tiga) domain utama, yaitu: kebijakan, tata kelola, dan layanan".

Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan (sebagaimana target perencanaan Menteri PPN/Bappenas), SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu, mengubah tampilan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, akuntabel dari pusat hingga ke daerah. "*SPBE adalah suatu keharusan, bukan pilihan!!!!*".

Selanjutnya, berkenan kami memohon bimbingan dan arahan dari Bapak Wakil Presiden RI, tentang apa yang harus kami pedomani bersama dalam membangun SPBE di seluruh pemerintahan pusat hingga ke daerah. Atas perkenan waktu Bapak Wakil Presiden RI, kami mohonkan pula kesediaan untuk menyerahkan penghargaan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Polda yang telah melaksanakan SPBE dengan baik. *Sekian dan Terima Kasih.*

### **Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**APRIL**  
**2019**





**PELANTIKAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PANRB  
JAKARTA, 1 APRIL 2019**



**Yang saya hormati:**

- Sekretaris Kementerian PANRB, Para Deputy, dan Para Staf Ahli;
- Para Sesdep, Asdep, Karo, Inspektur serta Hadirin yang Berbahagia.

**Assalaamua'alaikum Wr. Wb.**

**Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita semua dapat mengikuti acara pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PANRB, melalui mekanisme seleksi yang semi terbuka guna mendorong terbangunnya sistem merit, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Tentu, mekanisme proses pada sub bagian manajemen SDM ASN tersebut (rekrutmen pejabat), sangat dijunjung tinggi pemenuhan aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja, guna menjamin regenerasi *leadership*, menyangga struktur organisasi, serta mengoptimalkan pencapaian program kerja kementerian secara menyeluruh.

**Bapak dan ibu sekalian,**

Studi World Bank, menyatakan bahwa diseluruh negara maju, kekayaan SDM adalah proporsi terbesar dari total kekayaan negaranya. Singapura, Swiss, New Zealand dan banyak negara lainnya, bisa maju bukan karena sumber daya alam, tetapi karena unggul sumber daya manusianya.



Kunci untuk membangun kualitas SDM terletak pada proses manajemennya, baik itu rekrutmen, mutasi, rotasi, seleksi, pendidikan hingga manajemen pensiun. Proses yang baik akan menghasilkan yang baik, sebaliknya jika prosesnya banyak celah kekurangan, maka hasilnya juga pasti banyak kelemahan. Oleh karenanya, sistem merit sangat penting dijalankan guna menjamin terbentuknya generasi pimpinan yang adaptif dengan dinamika tantangan, serta membentuk generasi smart ASN yang tangguh mengawal roda berjalannya birokrasi di masa depan.

Hari ini, para pejabat administrator dan pejabat pengawas, telah lulus dalam mekanisme sistem merit pada Kementerian PANRB. Semuanya memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk pengisian jabatan struktural di level awal, telah lolos dan lulus seleksi pengetahuan umum, serta memenuhi standar kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis spesifik. Ini bukan hanya keberhasilan anda, namun keberhasilan Kementerian PANRB dalam menerapkan sistem merit khususnya dalam seleksi pengisian jabatan struktural yang kosong -- bukan hanya pada tingkatan JPT, melainkan juga hingga level jabatan administrator dan pengawas.

Proses seleksi dilakukan secara berkeadilan, objektif, transparan, serta partisipatif dengan prinsip *the right man on the right place and on the right time*. Maka, anda yang sudah terpilih, tentu adalah yang terbaik pada spesialisasi di bidang administrasi maupun pengawasan.

Mengapa ini penting? Fungsi administrasi adalah prioritas utama yang memimpin pencapaian kinerja organisasi, sedangkan fungsi pengawasan yang mengontrol berjalannya kinerja agar sesuai arah dan target. Kedua peran penting pejabat administrator dan pejabat pengawas harus dibangun secara utuh, komprehensif dan sinergis sehingga dalam skala besar, program reformasi birokrasi nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Perancis dan Jepang adalah contoh negara yang maju karena pegawai negerinya yang direkrut berkualitas tinggi (mereka semua lulusan universitas terbaik), para pejabat administrator maupun pengawas dipilih dari sumber talenta dan ketersediaan pilihan yang melimpah. Bahkan dibangun sistem persaingan agar mereka berlomba menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai salah satu tolak ukur dalam seleksi kenaikan jabatan.



Oleh karenanya, penerapan sistem merit bukan hanya sekedar proses seleksi untuk menentukan siapa yang paling pantas menduduki posisi jabatan, tidak hanya berhenti hingga orang itu terpilih. Tetapi esensinya, dimulai sejak orang itu terpilih, hingga orang itu mengakhiri jabatannya, dirinya mampu menunjukkan kinerja yang diharapkan, mampu membangun jaringan dan struktur organisasinya, mampu mencapai kinerja yang optimal.

Dinamika perjalanan tugas sangat fluktuatif, kelulusan hanyalah faktor *de jure*, sedangkan faktor yang sesungguhnya (*de facto*), terlihat dari usaha dan kinerja yang lebih dari sekedar teori dan melampaui batas pengalaman kerja yang pernah dimiliki.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Oleh karenanya, kepada seluruh pejabat yang terpilih, tetaplah membangun jaringan baik secara vertikal maupun horizontal, kembangkanlah terus pengalaman kerja yang unggul dan tangguh, merespon perubahan secara cepat, berikanlah solusi nyata bagi setiap permasalahan di lingkungan kerja, bukan hanya berbelit pada proses.

Responlah kebutuhan kinerja, kebutuhan organisasi dan bahkan kebutuhan anggota secara cepat jangan berkuat pada tugas rutinitas, bergeraklah melampaui harapan, berpikir secara *out of the box*, mari berbuat yang maksimal dan berjuang optimal. Bergeraklah bersama untuk menuntaskan seluruh program di penghujung masa pemerintahan (Oktober 2019), sehingga kita dapat menciptakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan program di masa mendatang.

Selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, serta kepada seluruh keluarga yang mendampingi perjuangan anda hingga mencapai posisi penting dan strategis sekarang. Ini adalah amanah yang besar. Seluruh masyarakat, bangsa, dan negara, menantikan kerja nyata dan kerja keras kita semua untuk memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik.

**Sekian dan Terima Kasih  
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN PADA ACARA TRAINING OF TRAINER  
PENGEMBANGAN KAPASITAS AKADEMISI TERHADAP SAKIP  
JAKARTA, 4 APRIL 2019**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat Pagi, Sejahtera bagi Kita Semua**

**Yang saya hormati:**

- Ketua IAPA / Indonesia Association of Public Administration, Prof. Eko Prasajo;
- Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh;
- Para Dekan, Guru Besar; serta
- Para Akademisi, Dosen, Peneliti dari 40 Universitas di Indonesia yang Tergabung dalam IAPA yang Berbahagia.

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri **Training of Trainer (ToT) Pengembangan Kapasitas Akademisi terhadap SAKIP**.

**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Dunia telah menyajikan banyak pengalaman tentang silih bergantinya kekuasaan imperium yang menandai terjadinya transisi pemerintahan, lalu banyak pula contoh tentang keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan pemerintahan, ada pula yang membentuk pemerintahan global dalam suatu kawasan (seperti Uni Eropa).

“Keseluruhan itu muaranya satu, yaitu pemerintahan dibentuk bertujuan membangun kesejahteraan rakyat. Eksistensi negara tidak boleh terdistorsi oleh waktu dan zaman, namun sebaliknya mampu bertahan di tengah gelombang perubahan dan ketidakpastian global”.

Lalu, pertanyaan penting yang perlu dicermati: “bagaimanakah pemikiran tentang masa depan Indonesia”? Harapan, cita-cita, keyakinan, dan optimisme Indonesia untuk memasuki masa keemasannya pada tahun 2045, yaitu masyarakat yang madani dan sejahtera, tentu bukan sekedar angan-angan, bukan pula impian yang ibarat “jauh api dari panggang”. Bingkai masa depan Indonesia, dapat diraih melalui perjuangan seluruh anak bangsa secara bersama, dalam mengisi ruang waktu kemerdekaan, melalui pemanfaatan berbagai peluang, yang dihadirkan oleh globalisasi, demokratisasi, revolusi industri, hingga bonus demografi, untuk mendorong keberlanjutan pembangunan nasional di pusat maupun daerah.

Dalam konteks pemerintahan, tidak bisa dinafikkan, bahwa Indonesia harus menjalankan reformasi birokrasi secara berkelanjutan sebagai kondisi perlu yang disyaratkan mutlak untuk menopang pembangunan.

Dengan menyadari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; punya lebih dari 17.000 pulau; menerapkan sistem pemerintahan yang



sentralisasi di pusat serta otonomi di daerah (kombinasi desentralisasi). Pemerintahan Indonesia mengelola negara dengan postur 87 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 507 kabupaten/kota, serta implikasi kebijakan anggaran negara yang bersifat fokus dan prioritas, maka kita perlu mencatat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi juga sangat ditentukan oleh sebuah faktor bernama “pemerintahan yang efektif”.

Prof. Michael E. Porter dari *Harvard Business School* pernah menganalisa tentang efektifitas pemerintahan, penekanannya adalah fokus pada berbagai pilihan kebijakan publik yang harus dilakukan pemerintah di berbagai bentangan area dari makro ekonomi ke pendidikan ke kesehatan ke keamanan dan lainnya. Semua area itu, tentu telah dipelajari secara mendalam dan lahir banyak teori dari praktik terbaik yang muncul di setiap negara dari setiap kawasan, dari setiap sisi benua di dunia yang karakteristiknya khas dan paling tepat dilakukan oleh suatu negara untuk membangun efektifitas pemerintahan.

“Mengapa harus efektif, efisien, fokus dan prioritas”? Pertama, pemerintah memiliki banyak prioritas kebijakan, namun ada keterbatasan anggaran untuk merealisasikan semua kebijakan secara simultan. Kebijakan ekonomi menjadi *leading sector*, prioritas ditentukan, mengatasi isu sensitif diutamakan, implementasi kebijakan dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan. Kedua, penyesuaian dan pergantian kebijakan harus mengikuti perubahan prioritas negara, contohnya pemerintah menggeser fokus pada pembangunan SDM setelah infrastruktur terbangun. Ketiga, penyesuaian kebijakan pemerintah harus mengikuti dinamika perubahan global yang tidak pernah berhenti, performa pemerintahan harus terus ditingkatkan untuk memuaskan masyarakat.

Kesimpulannya pemerintahan harus berjalan secara dinamis, mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan dan fokus pada prioritas.

### **Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Inilah esensi yang sejatinya hadir dalam implementasi SAKIP di Indonesia. Secara konseptual, praktik SAKIP lahir dari teori yang sudah ada, namun secara praktik tentu berbeda, Indonesia membangun SAKIP dengan karakternya yang khas.

Melalui SAKIP, Kementerian PANRB mengasistensi setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat/hasil atas setiap rupiah anggaran yang mereka gunakan. Instansi pemerintah tidak lagi boleh hanya memikirkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya, kami mendesak instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas keberadaan mereka bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Melalui SAKIP, kami juga mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensinya. Birokrasi tidak boleh boros, melainkan mampu memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada secara bijak, sehingga dengan anggaran dan sumber daya yang terbatas, target-target pembangunan dapat tercapai secara memuaskan.

Dengan demikian, SAKIP akan menjadi garda yang mengawal berjalannya program pemerintah baik pusat maupun daerah, dari hulu perencanaan hingga hilir pelaksanaan, agar berjalan secara akuntabel, tepat sasaran yang fokus dan prioritas



pada pembangunan sehingga terbangun efektifitas dan efisiensi anggaran pemerintah untuk mencapai sasaran yang benar-benar berdaya ungkit bagi kesejahteraan rakyat.

Dengan menyadari tidak bisa dibendungunya kecepatan perubahan karena teknologi (karena, dalam setiap 20 tahun terjadi lompatan besar yaitu 10.000 kali lebih murah untuk transmisi dan penyimpanan data). Lalu, revolusi industri 4.0 berdaya ledak 3.000 kali lebih dahsyat dibandingkan edisi pertama pada abad 18 silam. Maka, *landscape* perubahan masyarakat akan semakin cepat, pemerintah tidak boleh tertinggal dalam mengantisipasi dan mengambil kebijakan yang dibutuhkan untuk perubahan di tengah masyarakat itu.

Dengan demikian, perluasan SAKIP (sebagai salah satu esensi penting pengambilan kebijakan publik) harus dipercepat. Strategi utamanya adalah dengan melibatkan para akademisi dan para ahli dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas implementasi melalui metode pendekatan riset dan ilmu pengetahuan terhadap realisasi kebijakan-kebijakan nasional.

Hubungan antara praktisi dan akademisi bagaikan simbiosis mutualisme. Burgoyne & Reynold (20 tahun lalu) menyatakan bahwa para praktisi butuh teori untuk membentuk ilmu yang dimiliki dan digunakan, sedangkan teori yang dipelajari oleh akademisi perlu diuji dan dikembangkan melalui pengalaman para praktisi.

Kementerian PANRB menyadari pentingnya upaya untuk mengeleminasi “gap” yang terjadi antara *basic* keilmuan yang dimiliki akademisi dengan *basic* pengalaman dari para praktisi, yang sejatinya harus digabungkan dan disatukan sehingga dapat membangun suatu formulasi kerangka pengetahuan yang komprehensif yang mendukung penyelenggaraan berbagai kebijakan publik yang berkualitas di Indonesia.

Implementasinya, seperti yang kita bangun bersama melalui konstruksi MoU antara Kementerian PANRB dengan *Indonesia Association of Public Administration (IAPA)* yang pada hari ini diimplementasikan melalui kolaborasi langkah Kementerian PANRB, IAPA dan 60 perguruan tinggi negeri di Indonesia guna membangun jembatan pengetahuan dan keselarasan paradigma konsep antara para akademisi dan praktisi dalam mengembangkan SAKIP.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh nara sumber, para dekan dan 60 akademisi dari 40 universitas. Besar harapan saya, kerja sama ini akan berkembang dan semakin luas cakupannya, program SAKIP akan semakin dikenal, makin seiring didengar dan makin dipahami oleh aparatur pemerintah maupun publik sehingga SAKIP menjadi salah satu “budaya baru” dan ujung tombak reformasi birokrasi yang berfokus pada efektifitas, efisiensi dan prioritas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional maupun daerah.

**Sekian dan Terima Kasih**  
**Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara**  
**dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN**  
**MULTI-STAKEHOLDER HUMAN RESOURCES**  
**AND ORGANIZATION DEVELOPMENT CONSORTIUM**  
**JAKARTA, 4 APRIL 2019**

**Yang saya hormati:**

- Ketua MA, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH;
- YM Vincent Guerrend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam;
- YM Christophe Bahuet, Director UNDP Indonesia;
- Direktur Utama PT. Taspen;
- *Head of Corporate Human Capital*, Triputra Group; serta
- Para Peserta Konsorsium yang Berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam Sejahtera bagi Kita Semua**



Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri **Konsorsium Pengembangan Organisasi dan Multi-Stakeholder di Bidang Sumber Daya Manusia** sebagai wadah *sharing* pengalaman terbaik tentang upaya membangun suatu



*platform* besar pengembangan sumber daya manusia pada setiap institusi pemerintah dalam rangka menopang akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia.

**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

“Perubahan dunia tidak terlepas dari perkembangan peradaban manusia, yang pada era sekarang dimobilisasi secara kuat oleh globalisasi melalui hadirnya revolusi digital”. Maka, semua negara dan bentuk pemerintahan di seluruh dunia, akan masuk pada “dimensi terbaru”, yang menitikberatkan pada aspek pembangunan sumber daya manusia serta penyerapan peluang teknologi untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya di masa depan.

Sejalan dengan itu, saya ingin menyajikan ilustrasi tentang simbiosis yang kuat antara teknologi dan peradaban manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Yuval Noah Harari (2015) melalui bukunya yang berjudul *“Homo Deus, a Brief History of Tomorrow”*.

Dahulu, sebelum fajar millenium ketiga menyongsong, peradaban umat manusia di dunia dihadapkan pada 3 (tiga) masalah besar yaitu kelaparan, wabah, dan perang. Kelaparan telah memusnahkan 10% populasi India dan Mesir sejak abad pertengahan;

memusnahkan 15% populasi Perancis pada tahun 1692 s.d. 1694; memusnahkan 1/3 populasi Finlandia pada tahun 1696; memusnahkan 20% penduduk Skotlandia di akhir tahun 1698. Wabah penyakit menular seperti maut hitam, menghancurkan 75 s.d 200 juta penduduk Eurasia pada tahun 1330. Epidemii penyakit di Amerika, Australia, Pasifik menghabisi 90% populasi lokal;



cacar memusnahkan 1/3 populasi Kuba dan Meksiko pada 1520; flu, tuberkulosis, tifus menghancurkan kemanusiaan di Hawaii, Amerika, Eropa, India, dan Kongo. Perang fisik seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, maupun perang dingin menghancurkan 15% peradaban umat manusia di zaman agrikultur kuno.

Sekarang semua berubah, teknologi menghadirkan nafas baru bagi umat manusia dalam mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Kehadiran teknologi telah mengubah proyeksi tahun 2030, dimana setengah populasi manusia kelebihan berat badan, bukan lagi kelaparan. Wabah dikendalikan, bioteknologi “memenangkan manusia dari serangan virus dan bakteri”. Perang fisik dihentikan oleh transformasi ekonomi global yang berbasis teknologi (melalui revolusi industri 1.0 hingga 4.0). Sekarang, perang merebut minyak dan kekayaan bumi lainnya berubah menjadi ajang lomba raksasa teknologi.

“Teknologi memberikan ras manusia keberlimpahan makanan, obat, energi dan bahan baku; mengembangkan kapasitas bumi dalam mendukung kehidupan manusia; bahkan meningkatkan level kehidupan manusia menjadi dewa (homo deus, diatas homo sapiens)”.



**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

“Teknologi adalah unsur penyempurnaan, elemen utama yang mengubah peradaban. Penyerapan teknologi merupakan proses yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia, menjadi mesin transformasi yang mengembangkan kapasitas negara dalam membangun pemerintahannya”.

Dalam World Government Summit di Dubai (Februari, 2019), saya mencermati bahwa semua negara dan pemerintah berpacu untuk bersiap diri dalam menghadapi rancangan masa depan dunia bukan lagi berada pada ruang fisik, namun “masa depan virtual” yang penuh ketidakpastian, ambiguitas, kompleksitas, dan selalu berubah.

Riset Mc Kinsey Global Institut menyatakan bahwa hingga tahun 2030, 400 juta pekerjaan akan hilang karena hadirnya *artificial intelligence*, namun akan menumbuhkan peluang perdagangan senilai 30 triliun dolar di area itu, termasuk *big data* yang potensial untuk produktifitas dan pertumbuhan. Contoh lainnya, pengembangan *artificial intelligence* perusahaan Nasdaq, telah menggeser kapitalisasi perdagangan *New York Stock Exchange* senilai 350 juta dolar pada tahun 2017, yang terus meningkat menjadi triliunan dolar dalam satu dekade.

Kecepatan teknologi tidak bisa dihentikan. Dalam setiap 20 tahun terjadi lompatan besar yaitu 10.000 kali lebih murah untuk transmisi dan penyimpanan data. Pemanfaatan sumber energi matahari menjadi lebih murah. Revolusi industri 4.0 memiliki daya ledak yang 3.000 kali lebih dahsyat dibandingkan edisi pertama pada abad 18 silam.

Pada *event* The CeBIT 2017, PM Jepang Shinzo Abe mengenalkan *Super Smart Society 5.0*. Pada tahun 2050, 40% populasi Jepang berusia 65 tahun ke atas, penuaannya sangat cepat, strategi Jepang untuk mengatasinya bukan lagi melalui penambahan penduduk, tetapi menggantikan manusia dengan robot/*artificial intelligence*. Jepang punya rencana umum pengembangan sains dan teknologi per lima tahun untuk menghadapi penuaan populasi, perubahan iklim, ketidakstabilan energi, pangan dan air.

Arab Saudi --- melalui kebijakan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, membangun visi 2030 guna mereformasi tatanan negara, budaya, sejarah dan arah pembangunan kerajaannya, yang tidak lagi bergantung dari minyak bumi (bahan bakar fosil yang bisa habis), melainkan merintis mega proyek NEOM, kota masa depan di kawasan khusus seluas 26.500 km<sup>2</sup> dekat laut merah sebagai destinasi wisata yang menyerap investasi dunia.

Lembaga riset sains Chengdu Aerospace Tiongkok --- mengembangkan teknologi peluncuran bulan buatan ke angkasa tahun 2020 yang bercahaya delapan kali lebih terang dari bulan asli, menerangi 80 km Kota Chengdu, sumber energi listrik menerangi kota sekaligus daya tarik wisata dunia. Tiongkok juga membangun koridor iklim yang memindahkan butir hujan ke Gurun Gobi, diubah lahan pertanian yang produktif, area penghidupan baru bagi generasi muda produktif Tiongkok di masa mendatang.

**Bapak dan ibu sekalian,**

Catatan diatas menyiratkan bahwa pemerintah harus berpacu melakukan reformasi birokrasi. Ditengah situasi tumbuhnya banyak sektor privat yang berorientasi



bisnis, BUMN atau BUMD yang berorientasi profit, kementerian dan lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik juga harus punya kecepatan pelayanan dan standar kinerja itu.

Riset Mc Kinsey mencatat bahwa 80% transformasi yang dilakukan oleh sektor publik di dunia, gagal menemukan tujuan utamanya dalam memuaskan harapan publik. Namun selalu ada alasan penting bagi pemerintah, untuk membangun keberlanjutan reformasi birokrasi, termasuk melalui penyerapan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia aparaturnya. "Peningkatan kualitas SDM yang mengawakili perubahan tidak boleh stagnan, harus setara kecepatannya, bahkan berkembang melampaui *skill* dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan modern di masa depan".

Inilah yang menjadi fokus utama Indonesia, dalam mengelola dua isu besar yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Tahun 2030, populasi penduduk Indonesia akan dipuncaki oleh 179 juta usia produktif, didalamnya tumbuh 63,4 juta jiwa (24%) generasi milenial, postur ketersediaan SDM yang berpikiran maju, inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi, yang siap untuk direkrut sebagai generasi smart ASN.

Pemerintah juga mengalokasikan 492,5 triliun rupiah (20% belanja APBN 2019) untuk anggaran pendidikan. Mega proyek Palapa Ring, 35.280 km kabel serat fiber optik di bawah laut dan 21.000 km di darat dibangun untuk menghubungkan konektivitas internet wilayah barat, tengah, dan timur. Satelit Nusantara Satu diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas internet menjangkau seluruh kepulauan nusantara. "Kombinasi ketersediaan anggaran dan infrastruktur ini, harus dioptimalkan melalui penyiapan SDM aparatur yang berkualitas".

Kementerian PANRB berupaya kuat membangun kapasitas 4,7 juta ASN ke arah smart ASN guna menyangga dinamisasi arah tata kelola negara dan pemerintah



Indonesia. Strategi kebijakannya yang pertama, perencanaan ASN mengacu pada *core business* instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dibangun aplikasi e-Formasi pada *command center* ASN untuk mengidentifikasi kebutuhan CPNS, sebaran PNS, tren pensiun dan anggaran untuk belanja pegawai.

Kedua, rekrutmen ASN terbesar sepanjang sejarah dunia (pada tahun 2017 - 2018) dilakukan

Kementerian PANRB dengan mengisi 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta pelamar terbaik dan berdaya saing tinggi. Fokusnya mengisi kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan SDM Indonesia, serta mengisi kebutuhan tenaga ahli pada bidang infrastruktur untuk penguatan upaya pembangunan infrastruktur dan teknologi.

Tahun 2019, dilanjutkan dengan rekrutmen PPPK, terdata sebanyak 51.293 peserta dengan rincian: 34.954 guru, 1.392 dosen PTNB, 1.485 tenaga kependidikan



PTNB, 1.792 tenaga kesehatan dan 11.670 penyuluh pertanian yang prosesnya masih berlangsung hingga sekarang.

Dalam praktiknya, telah dibuktikan dibentuknya kelompok kerjasama *multi stakeholder* untuk melakukan rekrutmen ASN, yaitu: Kementerian PANRB sebagai *policy maker*, BKN sebagai *policy implementation*, LAN sebagai *policy research and education*, KASN sebagai *policy supervision*.

Kementerian PANRB juga melibatkan Kemendikbud dan para akademisi perwakilan konsorsium dari beberapa universitas dalam penyusunan soal seleksi CPNS yang berstandar tinggi serta memenuhi kualitas keilmuan dan standar daya saing yang dibutuhkan. Lembaga seperti BPKP, BPPT, BSSN serta masyarakat juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan eksternal. Kementerian PANRB juga menggulirkan kebijakan rekrutmen ASN melalui sekolah kedinasan --- sejak 2014, terjaring 317.979 ASN atau 7% dari total ASN, yang akan ditingkatkan menjadi 21% di tahun 2024.

Kebijakan seleksi terbuka pada jabatan pimpinan tinggi diterapkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Faktor objektifitas, transparansi dan akuntabilitas diutamakan untuk menyebarluaskan sistem merit dalam regenerasi kepemimpinan di setiap institusi.

Ketiga, kebijakan pengembangan kompetensi melalui *assessment center* dibangun untuk meminimalisasi *gap* kompetensi pegawai. Diklat konvensional diubah menjadi berbasis *ASN corporate university*. Beberapa jam lalu, saya membuka *training of trainer* guna meluaskan pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada seluruh universitas di Indonesia. SAKIP ini adalah "*mutiara tata kelola pemerintahan baru yang terpendam*", kini muncul di Indonesia, penting untuk diluaskan dalam kurikulum pendidikan di universitas, bahkan dapat diadopsi oleh banyak negara dari kawasan lainnya maupun dunia.

Keempat, sistem penilaian kinerja dan penghargaan juga terus disempurnakan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kinerja ASN, sehingga kinerja, karier, dan remunerasi dapat diintegrasikan secara kompetitif.

Kelima, kebijakan promosi, rotasi, karier, dan kesejahteraan dikembangkan melalui skema perubahan sistem gaji, tunjangan dan fasilitas, serta pengembangan kebijakan manajemen kesejahteraan ASN.

### **Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Tantangan terbesar pembangunan SDM adalah menginduksi generasi tua agar mampu bergerak cepat mengadopsi perubahan pengetahuan dan teknologi sehingga mereka dapat mengajarkan generasi Y, Z dan milenial di masa depan untuk bergerak lebih cepat dari kecepatan "warisan gen milenial", yang dimilikinya.

Negara ataupun pemerintah tidak bisa berjuang sendiri, tidak bisa berdiri absolut. Francis Fukuyama (2017), telah memprediksi munculnya pemerintahan global yang ditandai oleh hadirnya organisasi *non-state* yang spesialis pada bidangnya, fleksibel, adaptif dan lebih cepat Bergeraknya dari organisasi besar bahkan "suatu negara".

Karena itulah, skema *open government* penting dibangun sebagai landasan fundamental untuk upaya membangun kebijakan publik, karena pemerintah dapat bergerak bersama dan sinergis dalam kerangka hubungannya dengan sektor privat dan masyarakat, untuk menghadirkan kebijakan yang terintegrasi, artinya: "yang



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

direncanakan, dilahirkan dan dilaksanakan” dapat menyentuh jantung harapan publik, cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat.

Oleh karenanya, saya mengapresiasi setiap unsur yang berkontribusi dalam pertemuan konsorsium ini, sebagai konkretisasi nyata konsep hubungan yang multi-lateral, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya.

Hal ini penting bagi pemerintah Indonesia untuk semakin menguatkan kerangka *open government*, terbuka menyerap setiap ide, masukan dan formulasi yang terbaik dari para peserta konsorsium guna mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pembangunan smart ASN yang berdaya saing global di masa depan.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN PADA ACARA  
PEMBUKAAN MUKTAMAR PEMUDA ISLAM (ISLAMIC YOUTH CONGRESS)  
“MENEGUHKAN SPIRIT KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT”  
JAKARTA, 4 APRIL 2019**

**Yang terhormat:**

- Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Islam;
- Plt. Sekjen DMI;
- Para Ketua Organisasi Pemuda Islam; serta
- Peserta Muktamar Pemuda Islam yang Saya Cintai dan Saya Banggakan.

**Assalamua‘alaikum, Wr. Wb.**

**Bismillahirrahmanirrahim.**

**Alhamdulillah Rabbil‘alamin Wassholatu Wassalamu ‘Ala,asyrafil Ambiyaa  
Walmursalin, Sayyidina Muhammadin, Wa‘alaa‘alihi Washohbihi Ajmain.**

**Amma Ba‘du.**

Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan berbagai nikmat, rahmat, dan karunia-Nya terhadap kita semua, serta salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir, serta menguatkan tali silaturahmi, sekaligus semangat ukhuwah islamiyah, basyariah, dan wathoniyah melalui kegiatan muktamar pemuda Islam ini.

Sebagai Wakil Ketua Umum DMI, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia dan seluruh peserta atas terselenggaranya kegiatan ini.

**Hadirin dan Para Pemuda Islam yang Saya Banggakan,**

Kita masih dalam suasana memperingati *Isra Mi‘raj*. Marilah kita jadikan momentum *Isra’ Mi‘raj* sebagai refleksi untuk semakin meningkatkan *akhlakul karimah*, mengangkat kembali makna hijrah Rasulullah SAW di zaman sekarang, *Allama Sayyid Sulaiman Nadwi* dalam karyanya *“The Life and Message of the Holy Prophet*





*Muhammad*” menuliskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang jujur dan adil dengan menanamkan nilai kepedulian sosial terhadap umatnya tidak pernah menebar fitnah dan kebencian diantara satu dengan lainnya, sebagai generasi muda Islam patut untuk kita tiru suri tauladan dan cara kepemimpinan Rasulullah SAW di era modern ini.

Kaum pemuda Islam adalah kekuatan *transformers*, yang potensinya harus dikembangkan dalam berbagai bidang *entrepreneurship*, peningkatan, kreatifitas, inovasi, daya saing yang berlandaskan *spirit uhkuwah islamiah* melalui berbagai program yang inovatif dan kreatif menciptakan karya-karya nyata dalam arus kemajuan berkelanjutan (*sustainable innovation*).

Pemuda Islam adalah generasi cerdas yang selalu berkontribusi dan berfikir positif demi kemajuan bangsa dan negara mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdaya saing tinggi untuk menjawab tantangan masa depan kita harus terus memperkuat konsolidasi keumatan dan kebangsaan untuk kembali melahirkan, “*reborn*”, kekuatan peradaban Islam yang pernah berjaya pada masa Rasulullah SAW.

### **Hadirin dan para pemuda Islam yang saya banggakan,**

Revolusi teknologi yang berorientasi pada digitalisasi dan virtualisasi, sejak revolusi industri 1.0 hingga sekarang revolusi 4.0 telah mengakselerasi kecepatan informasi mendorong perubahan yang paradoksial terhadap semua *landscape* kehidupan dan peradaban manusia menjadi tanpa batas ruang dan waktu.

Hadirnya teknologi terbaru, masa depan dunia menjadi “*masa depan virtual*” para ilmuwan berkompetisi mencipta spesies baru melalui proyek *humans 2.0*, tubuh



dan pikiran manusia dikembangkan dengan tanpa batas kelemahan. Tahun 2040, *beta body*, tubuh manusia dikembangkan lebih kuat, pintar, produktif dan memuaskan kehidupan. Tahun 2060, *beta mind*, otak terhubung langsung dengan alat eksternal sehingga manusia menjadi serba tahu secara instan. Tahun 2080,

*meta body*, detail pikiran manusia dipetakan dan diproduksi ulang secara biologis, digital maupun robotika, kemanusiaan jauh melampaui galaksi, manusia menjadi kreator bagi lainnya, menyaingi realitas di dunia digital dan tanpa batasan kemungkinan. Tahun 2100, dirancang *meta mind*, tidak bisa dipersepsikan lagi peradaban manusia. Saat ini PM Jepang, Shinzo Abe sudah mengenalkan *Super Smart Society/Generasi Society 5.0*.

Riset Mc Kinsey (2015) menyebutkan bahwa dampak revolusi 4.0 akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada efek revolusi industri 1 pada abad 18 silam. Tantangan generasi



muda Islam Indonesia bukan lagi pekerja asing terampil, tapi robot dan kecerdasan buatan. Yang tersisa nanti, hanyalah pekerjaan yang sulit dijangkau oleh teknologi seperti pikiran kritis, kemampuan berkomunikasi, analisis riset, bekerja sama, fotografi, videografi, menulis, dll.

“Teknologi sebagai unsur penyempurnaan pengetahuan, telah mengubah peradaban, bahkan memuncaki peradaban manusia itu sendiri”

Arab Saudi dengan visi 2030 mereformasi arah pembangunannya yang tidak lagi menjadikan minyak bumi sebagai pasokan utama namun telah merintis Mega Proyek NEOM, kota masa depan di suatu kawasan khusus seluas 26.500 km<sup>2</sup> di dekat Laut Merah dan menjadikan destinasi wisata sebagai pemasok devisa negara yang terbesar.

Cina telah melakukan riset melalui sains *Chengdu Aerospace* dan berencana meluncurkan bulan buatan ke angkasa tahun 2020 yang akan menyediakan cahaya delapan kali lebih terang dari bulan asli menerangi 80 km Kota Chengdu sebagai sumber energi kelistrikan untuk menerangi kota sekaligus daya tarik wisata dunia. Apa jadinya jika dunia malam pun akan terlihat seperti disiang hari (*membantah pepatah habis gelap terbitlah terang*).

### **Hadirin dan para pemuda Islam yang saya banggakan,**

Saya mengajak para pemuda Islam sebagai generasi milenial agar dapat memanfaatkan teknologi dengan cerdas dan selalu meningkatkan kualitas SDM, tidak mudah terprovokasi jangan terlena, generasi muda Islam merupakan *the golden ways*, mendasari kemajuan teknologi dengan ilmu agama sebagai pembatas dari segala keangkuhan manusia.

Kita menyadari bahwa secanggih apapun teknologi yang diciptakan manusia, Allah SWT akan mengembalikannya seperti kehidupan sedia kala sebagai tanda akhir zaman. Mari kita tingkatkan *ukhuwwah islamiyah*, *ukhuwwah wathoniyah* dan *ukhuwwah insaniah* untuk menjaga toleransi antar umat, menciptakan kedamaian abadi mewujudkan Islam yang *rahmatan lilalamin*.

Dalam sejarah Islam terbagi menjadi 3 priode yakni Periode Klasik (650-1250 M), Periode Pertengahan (1250–1800 M), dan Periode Modern (1800 – sekarang). Periode Klasik ditandai masa kejayaan dengan adanya luas wilayah kekuasaan Islam dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu pengetahuan dalam periode ini banyak ilmuan Islam yang tidak terkenal yang lebih dahulu menemukan ilmu pengetahuan contohnya, Ibnu Batutah seorang ahli geografi Islam penemu Benua Amerika pada abad ke-12 jauh sebelum Christopher Columbus menginjakkan kakinya di Benua Amerika pada tahun 1492, salah satu buktinya ditandai pengakuan Columbus tentang keberadaan masjid di satu bukit di Pantai Kuba, juga beberapa ilmuwan Islam penemu ilmu kedokteran yaitu Ibnu Sina.

Cerminan para ilmuwan Islam sebagai motivasi untuk para pemuda Islam agar terus berkarya meningkatkan kreatifitas, inovasi, daya saing dan etos kerja yang berlandaskan *spirit ukhuwah islamiyah* sebagai kekuatan untuk menumbuhkan



semangat dan jiwa pembaharuan dari periode generasi emas Indonesia, sebagai prasyarat Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.

### Hadirin dan para pemuda Islam yang saya banggakan,

Saya menaruh harapan besar kepada seluruh pemuda Islam tidak memandang apapun warnanya, apapun organisasinya, untuk menjadi garda terdepan membentengi bangsa ini dengan menjadi



pemuda yang mencitai kedamaian serta solid dalam berbagai hal positif. Perhatian dan dukungan saya kepada seluruh generasi muda Islam saya curahkan sepenuhnya sebagai wujud kepedulian terhadap tumbuh kembangnya pemuda Islam sebagai generasi penerus *estafet* kepemimpinan bangsa ini di masa yang akan datang.

Mari mengambil hikmah dari esensi/makna filosofis masjid, yang membuat jiwa dan raga kita ikhlas dalam setiap perjalanan hidup, belajar untuk mengorientasikan semua tujuan hidup hanya untuk menyembah kepada Allah SWT.

DMI mendukung sepenuhnya organisasi kepemudaan Islam untuk berkompetisi mengukir perestasi membangkitkan semangat mem-*brainwash* pemikiran kebangsaan para pemuda Islam, saat ini kita dihadapkan dengan situasi politik memilih pemimpin bangsa, DMI *on the track* menolak politisasi di masjid siapapun pemimpinnya kita tetap menjaga ukhuwah keislaman kita menjunjung tinggi persaudaraan menopang kerangka soliditas dan persatuan seluruh elemen masyarakat selaras dan saling menguatkan, bukan untuk saling melemahkan, demi kemaslahatan umat dan kejayaan Islam.

Negara Jazirah Arab hancur oleh fenomena *Arab springs*, karena diawali oleh demokrasi yang kebablasan yang tidak menghargai koridor dan menghalalkan segala cara untuk kemenangan dalam proses politik. Janganlah terlarut dengan berbagai *agenda setting* kepentingan kelompok tertentu yang akhirnya menghancurkan kedamaian rakyat.

Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* pada hari ini, 4 April 2019 M/27 Rajab 1440 H. Saya nyatakan Mukhtar Pemuda Islam (*Islamic Youth Congress*) resmi dibuka.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya muktamar ini semoga menggoreskan tinta emas dalam pengabdian, menjadi tunas **pemimpin sejati, menjadi Imaamulmuttaqien**, yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi agama, bangsa dan negara untuk **Islam Rahmatan Li'alamiin**.

“Sebaik-baiknya manusia, ialah dirinya yang bermanfaat untuk orang lain”.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN PADA ACARA  
WORKSHOP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
PADA SATKER DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, 11 APRIL 2019**

**Yang saya hormati:**

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Para Pejabat di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan RI; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua,**

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat sehat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara “**Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**”.





### Hadirin sekalian yang berbahagia,

Perubahan zaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis, bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktik suap dan pungli, efektif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi kehidupan masyarakat.

Maka, kunci pentingnya, birokrasi harus didorong melalui reformasi yang fundamental, terutama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mampu memberikan pelayanan publik yang mampu menjawab ekspektasi masyarakat.

Reformasi birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan *never ending process*, bahkan negara maju sekalipun tetap melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kebahagiaan warga negaranya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai *emerging country* harus terus berupaya memperbaiki birokrasi, sehingga tidak tertinggal dengan negara lainnya.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam praktiknya, setiap lima tahun sekali, operasionalisasi reformasi birokrasi dituangkan dalam RPJMN. Dalam RPJMN 2015–2019, terdapat 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu: 1) pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, 2) pemerintah yang efektif dan efisien, dan 3) pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

### Hadirin yang berbahagia,

Proses pelaksanaan reformasi yang mengubah *mind set dan culture set* membutuhkan komitmen yang kuat. Selain itu, luasnya geografis Indonesia, beragamnya suku dan budaya, serta banyaknya daerah otonom menjadi tantangan tersendiri. Untuk itulah perlu ada terobosan untuk mengakselerasi proses reformasi birokrasi ini, melalui pembangunan *pilot project* percontohan reformasi birokrasi



berupa zona integritas yang menjadi *role model* bagi unit kerja di semua sudut pelayanan pemerintah, kategori tersebut dikenal berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).



### **Hadirin yang berbahagia,**

Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sejalan dengan nilai-nilai organisasi BPK yaitu independen, integritas, dan profesional. Hal ini memiliki arti bahwa semua pelaksanaan tugas BPK harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, bebas dari KKN, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. BPK sebagai garda terdepan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sudah seharusnya berubah mengikuti tantangan kemajuan zaman. BPK RI diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan saran perbaikan dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan satuan kerja BPK RI dapat lebih adaptif dan dinamis terhadap perubahan, mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* dan pada akhirnya dapat mendorong semakin cepat roda pembangunan bangsa bergerak menuju visi Indonesia 2045, Indonesia yang maju dan madani, menjadi negara terbesar kelima di dunia.

Tahun 2019 ini, saya merasakan komitmen yang sangat kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih dari KKN, dan mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya unit kerja percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi WBK/WBBM. Khusus tahun 2018, terdapat 910 usulan unit kerja percontohan zona integritas menuju WBK/WBBM, dengan hasil evaluasi terdapat 200 unit kerja pelayanan dengan predikat WBK dan 5 unit kerja pelayanan dengan predikat WBBM, tiga diantaranya dari BPK RI.

Membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tentunya tidak mudah, karena pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, beserta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan tata kelola yang mencakup pembangunan budaya kinerja, manajemen sumber daya manusia, proses bisnis yang efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Tidak hanya sekedar membangun sistem, unit kerja percontohan juga harus berorientasi pada peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan indeks persepsi korupsi dan indeks persepsi pelayanan publik yang harus memenuhi standar tinggi. Sehingga, survei atas pelayanan dan persepsi korupsi menjadi hal yang penting dan utama dalam membangun WBK/WBBM.

Pembangunan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan instansi dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, sehingga program reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



**Hadirin peserta workshop sekalian,**

Pada bulan Maret lalu, kita telah sukses melaksanakan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019. Pada simposium tersebut, kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia mendapatkan apresiasi dari akademisi dan praktisi berbagai negara. Program-program unggulan reformasi birokrasi seperti sistem akuntabilitas kinerja dan zona integritas menjadi *role model* yang dapat dicontoh oleh negara-negara lain.

Meskipun kita telah mengalami kemajuan, namun tantangan kita kedepan semakin besar. Persaingan global semakin ketat, luasnya wilayah Indonesia, dan banyaknya jenis layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan masyarakat semakin tinggi. Kita sebagai pemerintah harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.

Tantangan-tantangan terhadap berbagai masalah sebagian besar dapat diatasi, namun selalu saja ditemui kasus-kasus baru. Selamat datang di era *progress paradox* yaitu hidup lebih baik, tetapi tuntutan-tuntutan untuk beradaptasi juga lebih besar.

Melalui pertemuan pada hari ini, saya berharap peserta *workshop* pembangunan unit kerja pelayanan percontohan zona integritas dapat menggali lebih dalam, mengenai bagaimana membangun budaya anti korupsi dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Kepada unit kerja percontohan BPK RI yang telah memperoleh predikat WBK dan WBBM, agar dapat menularkan ilmunya, membagikan pengalamannya kepada seluruh peserta *workshop* hari ini. Saya juga berharap agar setiap pimpinan unit kerja dapat memperkuat komitmennya dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM, meneguhkan semangat *national interest*, sehingga secara sistematis meningkatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bersih dari KKN dan pada akhirnya dapat memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat bertugas dan berjuang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

**Sekian dan Terima Kasih.**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN PADA KONGRES PERKUMPULAN  
ARSIP PERGURUAN TINGGI DAN ICoASHE  
SURABAYA, 22 APRIL 2019**

**Yang saya hormati:**

- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Kepala ANRI;
- Rektor Universitas Airlangga Surabaya;
- Ketua Umum Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi (PAPTI);
- Para Narasumber, Akademisi, Praktisi Kearsipan; serta
- Peserta Kongres.

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua**



Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita semua dapat menghadiri **Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi dan International Conference on Archives, Social Science, Humanities and Education.**



### **Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Dalam konteks global, peradaban manusia di seluruh penjuru dunia sedang memasuki lorong globalisasi dimana seluruh entitas di dalam peradaban itu sendiri, baik berwujud negara (yang di dalamnya ada pemerintah), organisasi internasional maupun regional, sektor privat bahkan masyarakat internasional, sedang berjalan di atas *landscape* perubahan yang sangat cepat karena hadirnya era baru bernama revolusi industri 4.0.

Kecepatan teknologi di era baru ini tidak bisa dihentikan. Apa yang terjadi di lorong era revolusi industri 4.0 ternyata berdaya hulu ledak 3.000 kali lebih dahsyat dari pada revolusi industri 1.0 pada abad 18 silam.

“Teknologi adalah unsur penyempurnaan, elemen utama yang mengubah peradaban. Teknologi telah mengubah dan meningkatkan level kehidupan ras manusia”. Bahkan dalam sebuah buku karya Yuval Noah Harari (2015) yang berjudul “Homo Deus, a Brief History of Tomorrow”, disebutkan hipotesis filosofis tentang “teknologi - humanisme” yang menandai ras manusia *homo sapiens* telah usai menjalani lintasan sejarahnya, sekarang era *homo deus*, model manusia yang lebih unggul diatas *homo sapiens*.

Dalam buku itu, dihadirkan pemikiran liberalisme, dimana era sekarang umat manusia telah meraih kemenangan dari kelaparan, wabah, dan perang fisik karena kecanggihan teknologi. Lalu, era mendatang saat kecanggihan teknologi menerbangkan peradaban manusia ke arah yang jauh lebih modern.

“Proses evolusi algoritma meretas masuk ke dalam gen manusia”. MRI mendeteksi segala penyakit tubuh manusia, Google & Novartis mengembangkan lensa kontak yang mendeteksi diabetes, Microsoft Band mengembangkan pita lengan memantau detak jantung, Google Flu Trends yang dengan mudahnya melacak endemi dan wabah flu di London, Google Baseline Study yang merancang profil data raksasa tentang kesehatan manusia sempurna, 23andMe yang memetakan algoritma pada unit terkecil tubuh manusia (kromosom/gen), algoritma Google dan Facebook yang dapat memetakan bahkan mengubah watak, kepribadian, dan psikologis manusia dalam kehidupan sosialnya, seperti memainkan emosi dan kesadaran manusia dalam peristiwa Pemilu.

Satu catatan penting dari gambaran diatas, bahwa “hampir semua analisa di dalam diri manusia serta keputusan tentang kehidupan, disandarkan pada analisa algoritma komputer. Prinsipnya, sangat serupa dengan kearsipan. Teknologi memetakan masalah, membangun ketersediaan data, membantu sajian analisis berbagai kemungkinan, lalu membantu menghadirkan pilihan solusi bagi masalah dalam koridor antar manusia.

Waze dan Google Map seolah berpikir nyata mengatasi kemacetan. Microsoft membangun Cortana yaitu agen virtual yang mengharuskan manusia memberi semua akses file, surel dan aplikasi sehingga *artificial intelligence* ini mampu memberi saran tentang kegiatan rapat, waktu pertemuan, mengingatkan kesalahan dalam keputusan bisnis. Google Now & Siri menggunakan algoritma pengetahuan terakumulasi untuk menjawab semua pertanyaan manusia.

Kindle Amazon mengumpulkan data para pembaca, memantau bagian buku yang dibaca cepat atau lambat, hingga bagian kalimat pada bagian buku itu berhenti dibaca.



Jika ditambah sensor pengenalan wajah dan biometrik, maka dapat mendeteksi detak jantung, tekanan darah, emosi, tertawa, sedih saat membaca buku.

### **Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Seluruh negara dunia mengembangkan teknologi untuk membangun raksasa pemerintahan yang menggenggam imperium dunia. Lihatlah AS dan Cina bersaing hebat bukan di medan peperangan, tetapi di medan teknologi yang mendukung ekonomi dan pemerintahan. Beberapa waktu lalu, saya bertemu perwakilan produsen teknologi Cina yang menceritakan keberhasilan Cina sekarang tidaklah terlepas dari adaptasi pemerintahan yang berbasis teknologi untuk mengembangkan pelayanan publik secara internasional, membangun kerja sama dengan sektor privat dan masyarakat sehingga menyangga kapasitas devisa dan ekonomi negaranya. Arsip-arsip kuno, hasil riset dan penelitian untuk pembangunan diubah menjadi data elektronik yang tersimpan dalam *big data*, didistribusikan cepat melalui sistem elektronik, semua keputusan kebijakan publik tepat sasaran dengan analisis yang komprehensif dan berorientasi *citizen need centric*, kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat, kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.

Sama seperti negara maju lainnya, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, dan lainnya juga demikian, semua pemerintahannya berbasis teknologi. Bulan Juni mendatang, saya akan hadir forum pelayanan publik oleh PBB di Azerbaijan yang juga membahas tentang berbagai praktik terbaik pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis teknologi.



Teknologi demikian dahsyatnya mengubah tata kelola administrasi pemerintahan negara, yang didalamnya juga meliputi tata kelola kearsipan pemerintahan. Maka, untuk Indonesia, tidak ada kata untuk menunda pembangunan SPBE secara progresif dan massif di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah pusat maupun daerah.

Pertama, dalam setiap 20 tahun, terjadi lompatan yaitu 10.000 kali lebih murah untuk transmisi dan penyimpanan data. Kedua, seluruh negara maju di dunia sudah membangun *e-Government* bahkan mendorong terciptanya *smart city* untuk menyajikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif dengan modernisasi peradaban manusia, sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negaranya. Kita bersaing untuk itu!

Ketiga, pembangunan SPBE dapat menciptakan ruang efisiensi yang signifikan (total belanja TIK pemerintah dari tahun 2014 s.d. 2016 mencapai 12,7 triliun rupiah, belum lagi ditambah efisiensi pada efek berantai pemborosan akibat biaya *maintenance*, disintegrasi informasi dan validitas data yang kurang). Jika perbaikan terus dilakukan, anggaran negara dapat di-*refocusing* pada kegiatan strategis yang mendukung



pembangunan, serta sejalan prioritas arah pengembangan kualitas SDM Indonesia menjelang hadirnya bonus demografi.

Keempat, sejalan dengan tujuan kearsipan itu sendiri, SPBE akan menghadirkan tata lintas data kearsipan yang terintegrasi, autentik, handal, dinamis, aman, melindungi kepentingan negara bahkan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan dan terarah.

*E-Government* dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi



kearsipan, area perubahan tata laksana untuk manajemen kearsipan birokrasinya, lalu *open government* dibangun untuk mendukung sistem kearsipan yang terbuka dan partisipatif. Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam sistem *e-Office* adalah bagian penting dalam Perpres SPBE. Maka, saya tegaskan bahwa penerapan *e-Government* di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi

sebuah kewajiban dan kebutuhan.

Dengan demikian, daur hidup arsip dapat berkelanjutan, arsip bukan lagi sekedar catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan dari suatu organisasi pemerintahan. Namun lebih dari itu, “Kearsipan adalah unsur utama yang tidak terpisahkan, menjadi bagian integral dari suatu upaya membangun pemerintahan modern, yang menyangga kemajuan suatu bangsa, yang melandasi penyempurnaan peradaban”.

### **Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Saya mengapresiasi kongres ini sebagai momentum bagi seluruh komunitas kearsipan di Indonesia melakukan refleksi dan kontemplasi dalam rangka menguatkan komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh menuju pengelolaan arsip yang lebih baik.

Oleh karenanya, ada beberapa hal sebagai penekanan yang perlu saya sampaikan. Pertama, upaya ini, tidak dapat dilakukan Kementerian PANRB atau lembaga ANRI sendiri, namun sesungguhnya adalah upaya bersama dari pusat hingga daerah, bahkan melibatkan lembaga kearsipan perguruan tinggi dan peran serta masyarakat secara simultan.

Kedua, khusus lembaga kearsipan pada perguruan tinggi sebagai unit kearsipan tingkat pertama, perlu dikembangkan melalui fungsi biro/bagian/subbagian sesuai bentuk perguruan tinggi. Oleh karenanya, kualitas SDM juga harus dibangun untuk menjalankan peran jabatan fungsional arsiparis secara profesional, melalui diklat yang selalu di-*upgrade* secara berkelanjutan sesuai konteks perkembangan zaman.

Ketiga, pengembangan jabatan fungsional Arsiparis harus menghadirkan standar ketersediaan arsip dan informasi kearsipan yang adaptif sebagai tulang punggung reformasi birokrasi.



Keempat, kembangkanlah EFS (*Electronic Filing System*) sebagai sistem penyimpanan arsip berbasis komputer yang lebih efisien, efektif, praktis dan mudah.

Terakhir, mari membangun penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif, dan terpadu guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan efektif dan efisien yang menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pelayanan kepentingan publik secara cepat, tepat dan aman sekaligus sebagai catatan historis yang melandasi terciptanya berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi nasional untuk kemajuan negara dan bangsa di masa mendatang.

**Sekian dan Terima Kasih.**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



**SAMBUTAN PADA RAKORNAS KEARSIPAN,  
HARI KEARSIPAN NASIONAL, DAN ANRI AWARDS  
JAKARTA, 25 APRIL 2019**

**Yang saya hormati:**

- Kepala ANRI;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga;
- Gubernur Sulawesi Selatan;
- Para Narasumber, Akademisi, Praktisi Kearsipan; serta
- Peserta Rakornas yang Berbahagia.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri tiga acara penting yang dirangkai satu yaitu: Rakornas Kearsipan, Hari Kearsipan Nasional Ke-48, sekaligus ANRI Awards pada tahun 2019.

Terima kasih atas undangan kepada saya memberikan ANRI Awards. Namun bersamaan itu, mengingat pentingnya momentum kearsipan, saya juga ditugaskan Bapak Wakil Presiden RI untuk mewakili memberikan sambutan membuka acara sekaligus *keynote speech*, karena beliau melaksanakan kegiatan kenegaraan lainnya.





**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Hari Senin (22/4), saya membuka Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi, di UNAIR Surabaya, suatu momentum penting pengembangan kearsipan nasional (khususnya di perguruan tinggi yang dikombinasikan melalui berbagai program riset dan penelitian *science*).

Prinsip kearsipan yaitu melekat dan merekam semua peristiwa peradaban manusia. Sejarah masa lampau bahkan ribuan tahun lamanya, tentang imperium bangsa yang besar, yang pernah ada, yang menguasai dunia, lalu yang hilang dan sekarang hadir di era peradaban baru dapat diketahui dan dipelajari melalui arsip dan catatan sejarah yang tersimpan baik.

Selanjutnya, dalam konteks global, tidak terpungkiri, peradaban manusia di semua penjuru dunia sedang memasuki lorong globalisasi, seluruh entitas di dalam peradaban itu sendiri, sedang berjalan di atas *landscape* perubahan yang sangat cepat karena hadirnya era baru bernama revolusi industri 4.0. Kecepatan teknologi tidak bisa dihentikan. Apa yang terjadi di lorong era revolusi industri 4.0 ternyata berdaya ledak 3.000 kali lebih dahsyat dari pada revolusi industri 1.0 abad 18 silam.

Maka, tentu banyak terjadi perubahan, juga termasuk di bidang kearsipan. Zaman batu *paleolitikum* hingga *neolitikum*, catatan budaya diukir melalui tulisan dan gambar di atas batu. Zaman prasejarah, banyak catatan pada tulang, kulit fosil maupun artefak kuno (seperti penemuan *hieroglif* oleh bangsa Mesir sejak 4000 tahun SM). Di nusantara, ditemukan metode pencatatan daun lontar berhuruf Palawa berbahasa Sansekerta. Zaman revolusi industri ditemukan tinta dan kertas, pengarsipan berujung di tumpukan kertas. Sekarang, revolusi digital, maju sangat pesat. Eric Ketelaar menyebutkan arsip telah melampaui batas-batas ilmu kearsipan dan tata kelola kearsipan dipacu mengoptimalkan canggihnya teknologi.

Buktinya, Kenneth Tibodeau dari *U.S. National Archives and Records Administration*, dalam artikelnya yang berjudul “Building the Arcives of the Future”, mencatat langkah fundamental Amerika Serikat dalam membangun tata kearsipan nasional berbasis teknologi/rekaman elektronik sejak tahun 1970. Adaptasi kearsipan bukan lagi hanya pada bentuk, sistem dan polanya, tetapi juga pada fungsinya, yang menjaga keterhubungan informasi di dalam arsip, dengan aktivitas manusia pada waktu dan zaman arsip itu digunakan, melalui pola distribusi yang serba elektronik. “Artinya, arsip kuno pun menjadi elemen yang paling berharga, rekaman di dalam arsip (berupa: konten, struktur, konteks) dapat menjembatani peradaban dan digunakan hingga di masa depan”.

**Bapak dan ibu yang berbahagia,**

Sejalan dengan prinsip kearsipan, sebuah buku karya Yuval Noah Harari (2015) yang berjudul “*Homo Deus, a Brief History of Tomorrow*”, merekam tentang garis linier peradaban manusia dengan teknologi. Bukan hanya mengupas pemikiran liberalisme, dimana sekarang kecanggihan teknologi telah memenangkan umat manusia atas kelaparan, wabah, perang, serta di masa depan kecanggihan teknologi akan menerbangkan peradaban manusia yang lebih modern. Namun juga, disajikan analisis “teknologi - humanisme” yang menandai ras *homo sapiens* telah usai lintasan sejarahnya, sekarang eranya *homo deus*, model manusia yang lebih unggul.



Maka, suatu keniscayaan bahwa pengarsipan pada sektor pemerintahan, sektor privat maupun masyarakat haruslah mengimplan teknologi. Contohnya Waze dan Google Map seolah berpikir nyata mengatasi kemacetan dengan menyajikan rekaman data digital jalan untuk pengemudi. Microsoft Cortana mengharuskan menginput akses file, surel, data, dan aplikasi secara virtual sehingga *artificial intelligence* ini mampu memberi saran tentang kegiatan rapat, waktu pertemuan, mengingatkan kesalahan pengambilan keputusan bisnis di sektor privat. Google Now dan Siri memakai algoritma pengetahuan yang terakumulasi secara digital untuk menjawab semua pertanyaan tentang kehidupan sosial manusia. Kindle Amazon mengumpulkan data para pembaca, memantau bagian buku yang dibaca cepat atau lambat, hingga menandai bagian kalimat yang berhenti dibaca. *Situs, Web, Cloud* dirancang guna menyediakan ruang kearsipan dunia maya yang tanpa gedung, tanpa bangunan fisik, tanpa areal tanah. Cukup dengan mengakses internet, arsip itu muncul dan secara nyata memberikan informasi yang akurat untuk semua kepentingan umat manusia.



Seluruh negara dunia mengembangkan teknologi untuk membangun raksasa pemerintahan yang menggenggam imperium dunia. Dua negara adidaya seperti AS dan Cina bersaing hebat bukan di medan peperangan, tetapi di medan teknologi yang mendukung ekonomi dan pemerintahan.

Teknologi di Cina menopang pemerintahan untuk mengembangkan pelayanan publik bertaraf internasional, membangun kerja sama dengan sektor privat sehingga menyerap investasi yang menyangga kapasitas devisa dan ekonomi negaranya. Arsip-arsip kuno, hasil riset, dan penelitian untuk pembangunan diubah menjadi data elektronik yang tersimpan dalam *big data*, didistribusikan cepat melalui sistem elektronik, semua keputusan kebijakan publik tepat sasaran dengan analisis yang komprehensif dan berorientasi *citizen need centric*, kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat, kepercayaan diri pemerintah pun menguat dalam menjalankan pembangunan.

Amerika Serikat, walaupun dalam struktur yang federal, sistem teknologi kearsipan dibangun secara persisten untuk digunakan aparaturnya masa depan, rekaman elektronik menjaga kepentingan pemerintah, menyeimbangkan dan menjamin ketersediaan akses data dan informasi yang mendukung kinerja dan fungsi semua entitas kementerian dan lembaga, arsip mendukung koordinasi dan kinerja kementerian dan lembaga. Sistem kearsipan dibangun dari hasil riset dan penelitian untuk berbagai program pembangunan, pertahanan, keamanan, intelijen, ekonomi, sosial, maupun politik. Walaupun nanti terjadi perubahan drastis, sistem kearsipan rekaman elektronik tetaplah permanen digunakan untuk menyangga proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik di masa depan.



Denmark, Australia, Korea Selatan, Inggris, Swedia, Finlandia, Singapura, New Zealand, Perancis dan Jepang (adalah top 10 negara dengan indeks pengembangan e-Gov terbaik dunia berdasarkan *UN e-Gov Survey 2018*). Bulan Juni, saya akan hadir forum pelayanan publik oleh PBB di Azerbaijan yang membahas praktik terbaik pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Saya ingin “menjual” kepada dunia bahwa program SAKIP Indonesia sekarang sudah menjadi produk tata kelola pemerintahan yang baru di mata internasional, bisa dikembangkan di setiap negara yang punya karakter sama dengan Indonesia. Didalamnya, tata kelola kearsipan pemerintah berbasis elektronik, menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan reformasi birokrasi.

### **Bapak dan ibu yang berbahagia,**

Dengan demikian, tidak ada kata lain bagi Indonesia selain mempercepat pembangunan SPBE secara progresif dan masif di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam setiap 20 tahun, terjadi lompatan yaitu 10.000 kali lebih murah untuk transmisi dan penyimpanan data. Peluang ini harus dimanfaatkan! Lalu, Indonesia tidak boleh tertinggal, seluruh negara maju bukan lagi berpikir membangun *e-Government* tetapi lebih komprehensif lagi berupa *smart city* yang makin mengadaptasi modernisasi, guna menopang kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negara. Kita bersaing untuk itu!

Pembangunan SPBE dapat menciptakan ruang efisiensi yang signifikan pada total belanja TIK pemerintah dari tahun 2014 s.d. 2016 yang mencapai 12,7 triliun rupiah, ditambah lagi efek berantai pemborosan biaya *maintenance*, disintegrasi informasi dan validitas data yang kurang. Jika perbaikan terus dilakukan, anggaran di-*refocusing* pada kegiatan strategis yang mendukung pembangunan, serta sejalan prioritas arah pengembangan kualitas SDM Indonesia menjelang hadirnya bonus demografi.

Lalu, sejalan dengan tujuan kearsipan itu sendiri, SPBE akan menghadirkan tata lintas data kearsipan yang terintegrasi, autentik, handal, dinamis, aman, melindungi kepentingan negara bahkan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan dan terarah.

*E-Government* dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi kearsipan, area perubahan tata laksana untuk manajemen kearsipan birokrasinya, lalu *open government* dibangun untuk mendukung sistem kearsipan yang terbuka dan partisipatif.

Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam *e-Office* adalah bagian penting dalam Perpres SPBE. Maka, penerapan *e-government* di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan kebutuhan.

Dengan demikian, daur hidup arsip dapat berkelanjutan, arsip bukan lagi sekedar catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan dari suatu organisasi pemerintahan. “Kearsipan adalah unsur utama yang integral dalam keseluruhan upaya membangun pemerintahan modern”.



**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Saya mengapresiasi Rakornas ini sebagai momentum refleksi dalam rangka menguatkan komitmen untuk melakukan pembenahan pengelolaan arsip yang lebih baik secara menyeluruh, sistematis dan dinamis.

Oleh karenanya, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, upaya ini, tidak dapat dilakukan Kementerian PANRB atau lembaga ANRI sendiri, tetapi bersama dari pusat ke daerah, melibatkan lembaga kearsipan perguruan tinggi, swasta dan peran masyarakat secara simultan.

Kedua, secara khusus kualitas SDM juga harus dibangun untuk menjalankan peran jabatan fungsional arsiparis secara profesional, melalui program diklat yang selalu di-*upgrade* secara berkelanjutan sesuai konteks perkembangan zaman.

Ketiga, pengembangan jabatan fungsional Arsiparis harus menghadirkan standar ketersediaan arsip dan informasi kearsipan yang adaptif sebagai tulang punggung reformasi birokrasi.

Keempat, kembangkanlah EFS (*Electronic Filing System*) sebagai sistem penyimpanan arsip berbasis komputer yang lebih efisien, efektif, praktis dan mudah.



Kelima, kearsipan diarahkan membangun produktifitas hubungan dan *knowledge learning* antar kelembagaan, antar elemen pemerintah, sektor privat, lingkungan bisnis dan akademisi dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan arsip, komputer, teknik elektronik, dan pustaka.

Keenam, fungsi riset harus membangun tiga fungsi digitalisasi infrastruktur sistem arsip yang utama yaitu saluran masuk, penyimpanan, dan penyebaran data. Lalu, variasi, sebaran dan keragaman koleksi materi arsip dijaga ketersajiannya di sepanjang waktu arsip itu dibutuhkan.

Terakhir, mari optimis bahwa penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif, dan terpadu yang mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan efektif dan efisien, menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pelayanan kepentingan publik secara cepat, tepat dan aman sekaligus sebagai catatan historis yang melandasi terciptanya berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi nasional untuk kemajuan negara dan bangsa.

**Sekian dan Terima Kasih.**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**



## KULIAH UMUM AKPOL

### “REFORMASI BIROKRASI GUNA MEWUJUDKAN INSTITUSI DAN GENERASI POLRI YANG TANGGUH MENGHADAPI DINAMIKA KEAMANAN” SEMARANG, 30 APRIL 2019

#### Yang saya hormati:

- Gubernur Akpol, IJP Dr. H. Rycko Amelza D., M.Si;
- Wakil Gubernur, Direktur Bintarlat, Direktur Akademik Akpol;
- Para Pejabat Utama Akpol; Danmentarsis; Para Tenaga Pendidik; Para Pengasuh; serta
- Taruna Akpol yang Berbahagia.

#### Assalamu’alaikum Wr. Wb.

#### Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Puji syukur atas karunia Allah SWT, kita dapat menghadiri kuliah umum bersama para taruna dan taruni Akademi Kepolisian, dalam rangka *sharing* pembekalan sekaligus membuka cakrawala terkait **Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Institusi dan Generasi Polri yang Tangguh dalam Menghadapi Dinamika Keamanan Baik pada Tataran Global, Regional Maupun Nasional** sebagai tulang punggung terselenggaranya pemerintahan yang menopang pembangunan kesejahteraan masyarakat.





### Para taruna yang saya banggakan,

Konstelasi dan dinamika pada tataran global dan kawasan dalam kerangka *megatrends global*, yang identik dengan evolusi, perubahan dan ketidakpastian (*seperti: ketersediaan pangan, air bersih dan energi; perubahan iklim; politik global dan ekonomi makro; globalisasi, revolusi teknologi 4.0., transisi demokrasi dan urbanisasi global dalam perlintasan peradaban*) telah menciptakan gelombang perubahan dahsyat bagi *landscape* internal suatu negara.

Oleh karenanya, seluruh bangsa di dunia, semua bentuk pemerintahan negara (yang orientasinya meningkatkan kesejahteraan rakyat) harus melakukan *shifting* berupa proses adaptasi yang strategis dan fundamental pada tata kelola negaranya, untuk menjadi semakin dinamis, profesional, modern, akuntabel, efektif, efisien, serta berkinerja tinggi.

Sesungguhnya, nafas perubahan itu sudah mengalir rongga dunia sejak dahulu, jejaknya bisa ditapak tilas melalui catatan sejarah, dimana berbagai imperium besar dunia, seperti Romawi dan Yunani Kuno, Ottoman, Mongolia, Britania Raya, Kekaisaran Perancis dan Spanyol, dan banyak lainnya di era-nya, silih berganti memuncaki peradaban, lalu setelah melampaui puncak kejayaan, terlebur menjadi pecahan kecil (menandai suatu kerajaan besar berubah menjadi banyak negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda satu dengan lainnya).

Noam Chomsky (2016) dalam bukunya yang berjudul *Who Rules The World?* menggambarkan peta kekuatan dunia dibawah genggaman Amerika Serikat pasca usainya Perang Dunia II. Kekuatan Washington diistilahkan sebagai “*De Facto World Government*” atau “*Masters of the Universe*”, karena mengontrol penuh kepentingan global, baik fokus Israel dan Palestina, Timur



Tengah, Iran, Amerika Latin, perang terhadap teror, organisasi ekonomi, hukum dan HAM, masalah utama peradaban. Melalui kedigdayaan kepemimpinan ekonomi negara G-7, IMF dan organisasi perdagangan dunia, sungguh tampak masa imperium baru dunia dibawah kecemerlangan Amerika Serikat, dengan ideologi bernama demokrasi.

sejalan dengan itu, teori *Clash of Civilization* oleh Samuel Huntington, juga menggambarkan “kemenangan” ideologi demokrasi Amerika Serikat. Gelombang besar “badai demokrasi” telah “menyapu” seluruh *landscape* global, menciptakan banyak peristiwa penting tentang drastisnya perubahan pemerintahan di banyak negara. Uni Soviet hancur, banyak negara *non western* mengikuti “*bentuk*” dunia barat. bahkan Cina yang kuat sekarang ini, tumbuh pesat setelah menggeser “komunisme-nya” menjadi “kapitalis” yang dalam banyak pembahasan hampir identik dengan demokrasi.

Termasuk Indonesia, demokrasi adalah salah satu sila yang diakui sebagai falsafah negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Namun, seiring berjalannya



periode kebangsaan, sistem pemerintahan juga berubah-ubah. Tahun 1998, peristiwa reformasi, menjadi tonggak penting perubahan negara untuk semakin terbuka, pemerintahan diorientasikan dari, oleh, untuk rakyat, fokus bekerjanya negara dan lembaga pemerintah diubah untuk menyentuh langsung jantung harapan publik, “bingkai” keberhasilan kinerja diukur dari kepuasan masyarakat, mekanisme tata kelola pemerintahan harus lebih baik dan dinamis untuk menghadapi perubahan yang sejatinya tidak pernah berhenti. Polri selalu menempatkan sasaran kinerjanya pada harapan publik, meraih *public trust* yang melegitimasi dukungan masyarakat untuk Polri.

Bahwa dipuncak keemasan “imperium demokrasi” yang telah mendorong perubahan besar, terjadi paradoks yang menghadirkan perubahan lainnya secara drastis. Noam Chomsky, menemukan dinamika baru dimana “*masters of the universe*”, justru bergerak mendukung teori dominasi elite ekonomi dan teori pluralisme bias,



bukan mendukung teori demokrasi elektoral mayoritas atau pluralisme mayoritas, mayoritas warga di amerika serikat memiliki keterbatasan pengaruh dalam kebijakan publik. Di Eropa, juga terjadi pergeseran penting. Contohnya: suara rakyat Yunani yang menentukan nasib bangsanya, harus kandas melalui kebijakan Troika (*the European Commission, European Central Bank dan IMF*).

“Intinya, ditengah perubahan, muncul gelombang perubahan yang berbeda. Seluruh pemerintahan di dunia menghadapi situasi tidak pasti, tidak menentu”. Demikian pula tantangan yang dihadapi Polri, sebagai sub-sistem pemerintahan/alat negara, harus siap menghadapi berbagai perubahan, karena ruang, konteks, konten dan waktu perubahan niscaya, selalu menghadirkan tumpahan dinamika Kamtibmas yang terbarukan.

Oleh karenanya, taruna/taruni Akpol harus paham dengan perubahan global sehingga masa kedinasan di lapangan, mampu bertindak, tahu cara untuk melangkah, paham penggunaan kewenangan dan kekuatan kepolisian secara tepat hingga pucuk pimpinan Polri di pundak, anda mampu menghadirkan kebijakan publik yang mengawal kehidupan, konsisten dan dinamis menyangga perubahan peradaban, Polri mampu bertahan sebagai *leading sector* yang mendorong kemajuan bangsa.

### **Para taruna yang saya banggakan,**

Bagaimanakah cara menghadapi perubahan itu? Sebuah pertanyaan menarik, yang secara filosofis saya temukan jawabannya saat menghadiri *World Government Summit* di Dubai, dari pembicara bernama Simon Sinek.

Disebutkan teori “*the finite and infinite game*” atau “permainan terbatas dan permainan tidak terbatas” untuk menjelaskan idealnya upaya yang dilakukan oleh suatu negara dan seluruh bangsa dalam membangun pemerintahan yang sangat kuat dalam mencapai tujuan mensejahterakan rakyatnya.



Simon Sinek menjelaskan, “permainan terbatas atau *finite game*”, memiliki pemain yang jelas, aturan yang kaku, semua pemain di dalamnya menyetujui tujuan bersama - -- seperti permainan olahraga pada umumnya, semuanya mengejar kemenangan. Setelah kemenangan datang, semuanya bubar, lalu permainan berikutnya datang silih berganti. Para pemain hanya pakem dengan permainan bidang itu-itu saja (seperti, pemain sepakbola belum tentu bisa bermain baseball).

Berbeda dengan “permainan tidak terbatas atau *infinite game*”, yang memiliki ragam karakter pemain yang nyata juga abstrak, aturan main selalu berubah, tujuan pemain yaitu melanggengkan permainan, berusaha bertahan dalam skema permainan yang tidak pernah berhenti.

Saat “*pemain finite game (pemain terbatas)*” menghadapi “*pemain infinite game (pemain tidak terbatas)*”, maka yang terjadi adalah “*pemain terbatas*” akan frustrasi dan kalah, karena mereka hanya bertujuan mencari kemenangan. Sedangkan, “*pemain tidak terbatas*” menjadi pemenang karena bermain stabil, mereka bertahan walaupun dalam skema permainan yang berubah dan tidak pernah berhenti.

Dalam skema peperangan: terjadi saat Perang Vietnam --- tentara Amerika sebagai “pemain terbatas” kalah dari pasukan Vietnam sebagai “pemain tidak terbatas” --- Amerika berjuang untuk mengalahkan Vietnam, Vietnam berjuang untuk bertahan hidup, hingga pasukan terakhirnya. Demikian pula, saat pasukan Soviet menghadapi Mujahidin di Timur Tengah --- pasukan Soviet mundur, karena Mujahidin sebagai “pemain tidak terbatas” berjuang untuk kehidupan, sedangkan pasukan Soviet sebagai “pemain terbatas”, hanya ingin mengalahkan Mujahidin.

Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu “*never ending area atau infinite game*”, karena didalamnya dialiri “nafas perubahan” yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan pergantian zaman. Reformasi birokrasi tidak berhenti hingga titik kesempurnaannya, ia langgeng dan didalamnya selalu silih berganti generasi yang menjalankannya. Buktinya, sejak merdeka, kita adalah generasi kesekian yang menjalankan pemerintahan, lalu di masa depan, dilanjutkan oleh generasi penerus. Para taruna adalah generasi Polri yang melanjutkan perjuangan menjalankan roda pemerintahan di bidang keamanan pada masa depan.

Maka, untuk menjalankan reformasi birokrasi, untuk melanggengkan eksistensi negara menghadapi dinamika global yang tak berujung, serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. “Anggota Polri harus menjadi pemain yang tidak terbatas, kinerjanya tidak dibatasi waktu, selalu adaptif dengan perubahan aturan, tidak terikat batas raihan kemenangan”.

*Mind set* anggota Polri harus diubah, mereka bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk penghargaan, bukan untuk predikat prestasi dalam bentuk angka. “sejatinya, Polri bekerja untuk memperjuangkan kehidupan, untuk peradaban panjang yang lebih baik dan jauh ke depan, untuk masa depan kemanusiaan, kehidupan anak dan cucu yang lebih baik. “inilah intisari *leadership* dalam pendidikan Akpol yang harus dipahami secara fundamental oleh para taruna”.



### **Taruna dan taruni yang saya banggakan,**

Penting untuk mengetahui isu strategis dunia dan arah pemerintahan ini bergerak. Reformasi birokrasi menjadi penopang terwujudnya keamanan masyarakat, konsolidasi demokrasi, kepastian hukum dan pembangunan.

Oleh karenanya, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu: 1) pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, 2) pemerintah yang efektif dan efisien, serta 3) pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Tahun 2017, Indonesia berhasil meningkatkan daya saing dari peringkat ke-40 menjadi ke-36, skor indeks kemudahan berusaha meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 pada tahun 2018. Indeks persepsi korupsi dijaga stabil dengan skor 37 di tahun 2017. Indeks efektivitas pemerintahan naik 17 level dari peringkat 103 ke peringkat 18 dari tahun 2015 s.d. 2017. Indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang meningkat di semua level pemerintahan menandakan bahwa kepercayaan, kepuasan dan legitimasi publik kepada pemerintahan di alam demokrasi tercapai, sehingga ini memberi kepercayaan diri bagi pemerintah guna menjalankan program pembangunan nasional.

### **Para taruna yang berbahagia,**

Seluruh capaian tersebut mampu diraih melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola negara. Pertama, penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam 2 (dua) tahun terakhir, berhasil memfokuskan 106 Triliun Rupiah anggaran untuk prioritas pembangunan di pusat dan daerah, serta membangun kemandirian daerah dalam meningkatkan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Efisiensi birokrasi terus diperbaiki, 351 unit percontohan zona integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dibangun secara masif, penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran terus dilanjutkan (termasuk Polri yang meraih peringkat kedua unit perubahan terbanyak setelah Kementerian Keuangan).

Program SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan wilayah otonomi khusus sebagai pusat ekonomi yang menyangga kemajuan negara. Inilah kunci kemajuan suatu negara, Amerika maju bukan karena Washington tetapi membangun wilayah ekonomi khusus yang otonom, Cina juga membangun ekonominya melalui revolusi ekonomi yang berpusat di wilayah.

Kedua, modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, tetap diorientasikan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Ribuan inovasi pelayanan publik dirangsang lahir secara *bottom up* setiap tahunnya (Polri punya andil besar dalam perubahan pelayanan di sektor keamanan masyarakat).

Ketiga, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipercepat agar semua terkoneksi, sehingga mendorong integrasi, percepatan tata kelola serta penghematan anggaran negara yang sangat besar. (Polri sebagai percontohan utama pengelolaan *platform* kerja berbasis elektronik).

Keempat, manajemen SDM aparatur dirancang sesuai *core business* pembangunan nasional. Selama dua tahun terakhir direkrut 275.000 formasi jabatan



dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem *computer assisted test*. Sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karier dan kesejahteraan terus diperbaiki. (Di Kementerian PANRB, nilai dan praktik rekrutmen terbaik yang dilakukan oleh SDM Polri, saya adaptasikan nyata guna menguatkan proses rekrutmen ASN secara nasional).

### **Para taruna dan hadirin sekalian,**

Masa sekarang dan akan datang, Indonesia menghadapi dua isu besar yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya tahun 2045. Dari 106 negara yang berpendapatan menengah pada tahun 1960, hanya 13 yang berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus menjadi salah satu dari 13 negara itu dengan memanfaatkan peluang demografi.

Riset *Indonesia Millennial Report 2019*, mencatat bahwa populasi penduduk Indonesia akan dipuncaki oleh proporsi usia produktif mencapai 179 juta jiwa (67,6%), didalamnya tumbuh 63,4 juta jiwa (24%) generasi milenial.

“Jaminan utama bagi masa depan bangsa, bukanlah sumber daya alam yang dimiliki negara itu, tetapi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa”. Studi World Bank, menyatakan bahwa diseluruh negara maju, kekayaan SDM adalah proporsi terbesar dari total kekayaan negaranya. Contohnya: Singapura, Swiss, New Zealand dan banyak negara lainnya. Mereka bisa maju, bukan karena sumber daya alam, tetapi karena keunggulan sumber daya manusia.

Dalam konteks revolusi industri 4.0, digitalisasi dan virtualisasi akan menjadi “ruang dan area bermain utama” generasi milenial dalam membangun bangsa di masa depan. “Ibarat organisme dan ekosistemnya, yang paling cocok hidup dalam habitat era digitalisasi dan virtualisasi, adalah generasi milenial (termasuk taruna). Oleh karenanya, para taruna yang ada di hadapan saya sekarang, adalah peluang dan kesempatan terbaik yang dimiliki oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia. Kepada andalah nasib bangsa ini akan bertumpu, sedangkan saya dan generasi tua lainnya nanti, hanya bisa melihat dan menanti apa yang anda perbuat.

Riset Mc Kinsey (2015) menyebutkan bahwa dampak revolusi 4.0 akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada efek revolusi industri 1.0 pada abad 18 silam. Maka, optimislah mengombinasikan kedua isu besar itu guna meledakkan kemampuan Polri di mata dunia.

Tantangan anda di masa mendatang, bisa jadi kejahatan oleh robot dan kecerdasan buatan. Dulu tidak ada bentuk kejahatan bernama *hoax*, sekarang barang itu sudah ramai bermunculan di media sosial, mendegradasi ruang literasi publik, bahkan seperti gurita yang subur, yang terjadi di dunia nyata, seolah tersisa dan tertumpah dari yang terjadi di dunia maya. Tidak diketahui siapa dalangnya, semua bergerak masif di dunia maya, muncul ke dunia nyata dalam bentuk aksi massal yang destruktif.

### **Para taruna yang berbahagia,**

Yuval Noah Harari (2015) dalam bukunya yang berjudul “Homo Deus, a Brief History of Tomorrow”, menggambarkan sekarang kecanggihan teknologi telah



## MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

memenangkan umat manusia atas kelaparan, wabah, perang. Di masa depan, kecanggihan teknologi akan menerbangkan peradaban manusia yang lebih modern yaitu “*tekno - humanisme*” yang menandai ras *homo sapiens* telah usai lintasan sejarahnya, sekarang eranya *homo deus* yaitu model manusia yang lebih unggul.

Tahun 2050, Jepang punya strategi mengatasi 40% populasi yang penuaannya sangat cepat dengan membuat robot/*artificial intelligence* sebagai penduduk *society 5.0*. Tahun 2020, Cina mengembangkan teknologi peluncuran bulan buatan ke angkasa di atas Kota Chengdu sebagai sumber energi listrik terbaru membangun koridor iklim yang memindahkan hujan ke Gurun Gobi, diubah sebagai lahan pertanian produktif.



Indonesia membangun Palapa Ring 35.280 km kabel serat fiber optik di bawah laut dan 21.000 km kabel serat fiber optik di darat untuk menghubungkan konektivitas internet wilayah barat, tengah, timur. Satelit Nusantara Satu diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas internet *broadband* pita suara, komunikasi, data dan video yang menjangkau seluruh kepulauan nusantara.

Banyak hal lainnya yang terjadi di seluruh dunia, tanpa batas area, memainkan rupa di ruang maya, melampaui pemikiran dan aktivitas konvensional dan pada akhirnya akan mengubah *landscape* tantangan keamanan yang akan anda hadapi di masa mendatang.

“Tidak ada jalan untuk mundur, yang ada hanyalah jalur untuk menapaki masa depan”. Tidak ada pilihan lain, selain bekerja keras dan cerdas dan selalu meningkatkan kualitas SDM melalui adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimulai sejak anda berada di lembaga pendidikan Akpol.

Inilah penghujung pemikiran saya saat menjadi pimpinan Polri serta berdasarkan pengalaman karier 34 tahun saya di kepolisian yang harus anda ketahui. Akpol menyiapkan putra/putri terbaik, dididik, dan dilatih sebagai calon pimpinan Polri. Dapurnya disini, saya yakin sesungguhnya itulah kunci perubahan bagi tata kelola organisasi Polri dan bangsa di masa mendatang”.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mengakhiri kuliah umum ini, saya berpesan kepada para taruna, belajarlah dengan penuh semangat, berlatihlah dengan tekun, jangan mengejar prestasi di kampus saja, tetapi kembangkanlah kreativitas dan cita-cita untuk menghasilkan karya demi karya terbaik dari waktu ke waktu, jadilah agen perubahan yang langgeng sebagai mesin dinamisasi Polri dalam menjawab perubahan global, karena itulah simbol pengabdian anda sebagai "*pemain tidak terbatas*" dalam menghadirkan keamanan untuk rakyat, membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemajuan bangsa, serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

**Sekian dan Terima Kasih.**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Drs. Syafruddin, M.Si.**